

**KEBIJAKAN ANGGARAN UNTUK SEKTOR
PENDIDIKAN GRATIS DI KOTA BLITAR TAHUN 2010-
2016**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dengan Minat utama Reformasi Pemerintahan**

Oleh:

ERSAHD RIZKY DIAZTIRA

NIM. 105120607111028



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

KEBIJAKAN ANGGARAN UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN GRATIS DI

KOTA BLITAR TAHUN 2010 - 2016

SKRIPSI

Disusun oleh :

Ersahd Rizky Diastira
NIM.105120607111028

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Fathur Rahman, S.IP., M.A
NIK. 2011098204291001

Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si
NIK. 2013048811042001

**KEBIJAKAN ANGGARAN UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN GRATIS DI
KOTA BLITAR**

Disusun oleh:

Ersahd Rizky Diastira

NIM. 105120607111028

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian sarjana
pada tanggal 09 Agustus 2017

Tim Penguji:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Fathur Rahman, S.IP., M.A

NIK. 2011098204291001

Tanggal : 09 Agustus 2017

Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si

NIK. 2013048811042001

Tanggal : 09 Agustus 2017

Ketua Sidang Majelis Penguji

Sekretaris Sidang Majelis Penguji

Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec., Dev.

NIK. 201405 860921 1 2 001

Tanggal : 09 Agustus 2017

Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP

NIP. 198108252015041001

Tanggal : 09 Agustus 2017

Malang, 09 Agustus 2017

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak

NIP. 196908141994021001

IDENTITAS TIM PENGUJI

1. Nama : Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M. Ec Dev

NIP : 20140586092112001

Tugas : Ketua Majelis Penguji

2. Nama : Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP

NIP : 198108252015041001

Tugas : Sekertaris Majelis Penguji

3. Nama : Fathur Rahman, S.IP., M.A

NIP : 2011098204291001

Tugas : Anggota Majelis Penguji I

4. Nama : Irma Ulfah, S.IP., M.Si

NIP : 2013048811042001

Tugas : Anggota Majelis Penguji II

PERNYATAAN

Nama : Ersahd Rizky Diaztira

NIM : 105120607111028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **KEBIJAKAN ANGGARAN UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN GRATIS DI KOTA BLITAR TAHUN 2010 – 2016** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang 11 Agustus 2017
Yang membuat pernyataan

Ersahd Rizky Diaztira
NIM.105120607111028

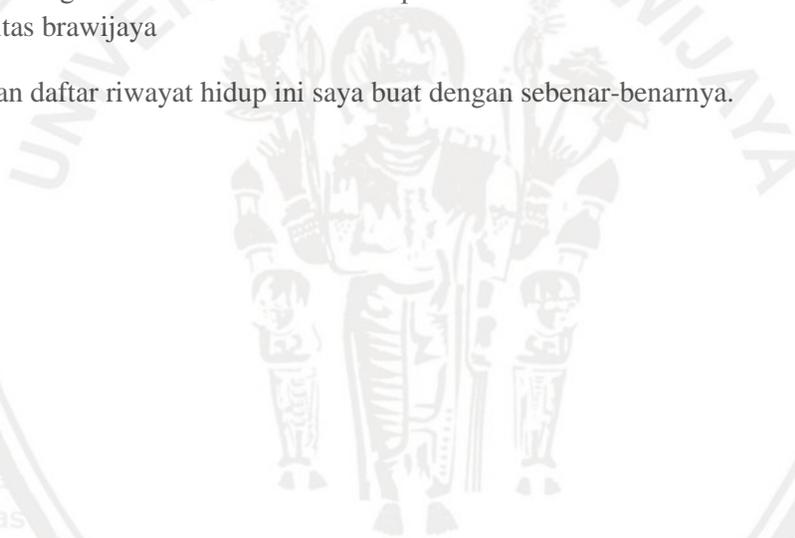
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : ersahd rizky Diaztira
2. Tempat lahir : blitar
3. Tanggal lahir : 01 september 1991
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Status : belum menikah
6. Agama : khatolik
7. Kewarganegaraan : indonesia
8. Alamat asal : jalan borobudur no.40, kota blitar, jawa timur
9. Alamat domisili : jl. Bunga asparagus no 4, kecamatan lowokwaru, malang, jawa timur
10. No telepon : 085735492051
11. E-mail : ersahd rizky diaztira
12. A. Riwayat pendidikan
 1. 1999-2004 : SDK santa maria kota blitar
 2. 2004-2007 : SMPN 1 kota blitar
 3. 2007-2010 : SMAN 3 kota blitar
 4. 2010-sekarang : program studi ilmu pemerintahan di universitas brawijaya, malang
- B. pengalaman organisasi
 1. anggota himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan universitas brawijaya 2010-2012
 2. anggota societo cinema club fisip universitas brawijaya 2011-2012
 3. panitia launcing film new crew societo cinema club
 4. panitia leaders of government (LOG) mahasiswa Ilmu pemerintahan
- C. pengalaman kerja
 1. tim pengawas di PT data lsi lembaga survei indonesia, hitung cepat pemilu presiden 2014
 2. staf magang di tata pemerintahan, pemerintah kota blitar tahun 2013
 3. karyawan di toko "batyo shoes" matos tahun 2012-2013

D. pengalaman seminar dan pelatihan

1. seminar nasional politic of multiculturalism and national identity “reflecting indonesia canada multiculturalism”
2. seminar nasional “sosialisasi 4 pilar kebangsaan”. Dalam kegiatan sosialisasi pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia dan bhineka tunggal ika
3. seminar nasional “menakar kualitas demokrasi melalui kinerja wakil-wakil rakyat berlatar belakang selebriti”
4. seminar terbatas “inovasi pemerintahan di 4 provinsi, 15 kabupaten/kota” yang diselenggarakan oleh pusat kajian inovasi pemerintahan dan kerjasama antar daerah
5. “leader of government” mahasiswa ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas brawijaya

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



ABSTRAK

Ersahd Rizky Diaztira (2017) : Kebijakan anggaran untuk sektor pendidikan gratis di kota Blitar tahun 2010 – 2016, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.**Dosen pembimbing : Fathur Rahman S.IP., M.A dan Irma Fitriana Ulfah, S.IP.,M.Si**

Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan pengukuran anggaran APBD berbasis kinerja yang diformulasikan untuk pendidikan gratis di Kota Blitar. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan penerapan anggaran APBD untuk mengevaluasi kinerjanya ketika di implementasikan kepada kondisi sosial yang berada di masyarakat Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan konsep Value For Money yang digunakan untuk menganalisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat tiga indikator utama dalam konsep Value For Money yaitu Ekonomis, Efisien dan Efektifitas. Ekonomis dalam hal ini adalah pemerolehan hasil dengan kualitas tertentu dengan menggunakan harga yang relatif rendah, kinerja pemerintah daerah bisa dikatakan ekonomis apabila rasionya diatas 100% atau jumlah realisasi penerimaan lebih dari jumlah anggaran yang sudah ditetapkan. Efisien dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pemanfaatan hasil minimal guna mencapai hasil yang maksimal atau dalam prakteknya melakukan sesuatu program kegiatan dengan benar, dikatakan efisien jika program atau kegiatan tersebut mampu menghasilkan hasil yang besar atau semaksimal mungkin. Dikatakan efektif apabila pencapaian tingkat hasil program atau kegiatan dengan target yang ditetapkan, menjalankan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang sudah direncanakan kemudian dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan berdasarkan potensi daerah itu sendiri semakin tinggi semakin baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, observasi, dokumentasi yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi sosial masyarakat Kota Blitar sebelum adanya kebijakan Walikota Blitar dan sesudah implementasi kebijakan sekolah gratis. Pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami masyarakat dalam menempuh pendidikan khususnya warga kota. Konsep sekolah gratis ini didasari oleh pilihan sadar dan rasional. Kota Blitar tidak memiliki Sumber Daya Alam yang memadai yang dapat diolah untuk kesejahteraan masyarakatnya, tidak adanya tambang emas, tambang batu bara, tambang minyak, gunung, laut dan pantai yang dapat diolah untuk pendapatan asli daerah. Realitas alam itulah yang merupakan disadari oleh Walikota Blitar, Samanhudi Anwar, untuk berfokus pada membangun Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Pilihan sadar dan rasionalnya adalah dengan mengoptimalkan pembangunan berbasis manusia (*human centered development*). Dengan adanya kebijakan program pendidikan gratis di Kota Blitar dan berbagai inovasi untuk pendidikan, masyarakat sangatlah terbantu dan juga bisa meringankan beban para walimurid sehingga anggaran bisa digunakan untuk kebutuhan yang lainnya sehingga program pembangunan Sumber Daya Manusia (*human centered development*) ini dapat berjalan sesuai harapan demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kota Blitar.

Kata kunci : Kota Blitar, APBD Pro Rakyat, Pendidikan Gratis.

Ersahd Rizky Diaztira (2017) : Budget Policy of Free Education Service In Blitar 2010 - 2015, Thesis Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Brawijaya.

Advisors : Fathur Rahman S.IP., M.A and Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si

The research discusses about how the application of performance-based regional government budget measurement formulated for free education in Blitar. The purpose of this research is described the application of regional government budget for evaluating its performance when it is implemented to social condition in Blitar city society. The concept of this research is Value For Money that is used to analyze the achievement of performance in good governance. There are three main indicators of Value For Money concept, that are Economical, Efficient and Effective. Economical is the acquisition with a certain quality by using a relatively low price, local government performance categorized to be economical if the ratio is above 100% or amount of realization of receipts more than amount of budget already set. Efficient categorized by the utilization of minimal results in order to achieve maximum results or in practice, do something program activities correctly. It could be efficient if the program or activity is able to produce large or maximum results. While effective if the achievement of the program or activity level with the target set, leveraging the ability of local government in realizing the original revenue area that has been planned and then compared by the target that has been set based on the potential of the region itself, the higher is the better. This research uses qualitative method. This research is written with literature study, interview, observation, documentation that explain about how social condition of society of Blitar City before Blitar Mayor policy and after implementation of free school policy. In this study the researcher found that many of the obstacles faced by the public in taking education, especially the citizens of the city. The concept of free schooling is based on a conscious and rational choice. The city of Blitar does not have sufficient Natural Resources that can be cultivated for the welfare of its people, the absence of gold mines, coal mines, oil mines, mountains, seas and beaches that can be cultivated for local revenue. It is the reality of nature that is realized by the Blitar Mayor, Samanhudi Anwar, to focus on build his Human Resources (HR). The conscious and rational choice is to optimize human-centered development. With the policy of free education program in Blitar City and various innovations for education, the community is very helpful and can also ease the burden of the parent so that the budget can be used for other needs so that human development program (human centered development) can run as expected for Welfare and gains of the people of Blitar City.

Keywords: Regional Government Budget, People's Pro Budary, Free Education.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena hanya dengan ridho dan petunjuk-Nya serta limpahan kesehatan yang diberikan oleh-Nya peneliti masih mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Anggaran Untuk Sektor Pendidikan Gratis Di Kota Blitar Tahun 2010-2016”**. Penelitian ini berangkat dari keinginan peneliti untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan anggaran pendidikan gratis pada masyarakat kota blitar tahun 2010-2016.

Pada penyusunan skripsi ini,peneliti dibantu oleh beberapa pihak hingga skripsi inni terselesaikan. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketiga orangtua, mertua, calon istri serta keluarga besar di Kota Blitar yang selalu memberikan doa,dukungan serta semangat kepada peneliti.
2. Bapak Fathur Rachman. S.IP,.M.A selaku pembimbing pertama yang selalu memberikan bimbingan, pelajaran baru dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Irma Fitriana Ulfah. S.IP,.M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Ratnaningsih Dhamayati. S.IP,.M.Ec.Dev selaku dosen penguji pertama serta Bapak Racmad Gustomy. S.IP,.M.IP selaku penguji kedua yang telah memberikan waktu, kritik dan saran yang membangun kepada peneliti untuk menyempurnakan skripsi ini.
5. Seluruh jajaran dosen Ilmu Pemerintahan yang berada di gedung A lantai 2 FISIP, yang turut memberikan dukungan dan masukan-masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini
6. Seluruh jajaran IPM 2010 yang sudah memberi pelajaran hidup tiap masing-masing individu dan seluruh kenangan-Nya selama menepuh pendidikan di Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu,saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan. Akhir kata, semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya peneliti pribadi.

Malang, 11 Agustus 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

HALAMAN PERSETUJUAN.....ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

PERNYATAAN ORISINALITASiv

ABSTRAKv

ABSTRACT.....vi

KATA PENGANTARvii

DAFTAR ISIviii

DAFTAR TABELix

DAFTAR GAMBARx

DAFTAR BAGANxi

DAFTAR ISTILAHxii

I. PENDAHULUAN..

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Rumusan Masalah..... 6

1.3. Tujuan Penelitian..... 7

1.4. Manfaat Penelitian..... 7

 1.4.1. Manfaat Akademis..... 7

 1.4.2. Manfaat Praktis..... 7



II.	TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1.	Konsep Value For Money.....	8
2.2.	Studi Terdahulu.....	12
2.3.	Alur Pikir Peneliti.....	13
III.	METODE PENELITIAN.....	15
3.1.	Jenis Penelitian.....	15
3.2.	Fokus Penelitian.....	16
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	17
3.3.1.	Data Primer.....	17
3.3.2.	Data Sekunder.....	17
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.4.1.	Wawancara.....	18
3.4.2.	Observasi Partisipan.....	19
3.4.3.	Dokumentasi.....	20
3.4.4.	Studi Pustaka.....	21
3.5.	Informan Penelitian.....	21
3.5.1.	Informan Kunci.....	22
3.5.2.	Informan Utama.....	22
3.6.	Teknik dan Analisis Data.....	26
IV.	GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1.	Gambaran Umum.....	27
4.1.1.	Gambaran Umum Kota Blitar.....	27
4.1.2.	Letak Geografis dan Administrasi.....	27
4.1.3.	Kependudukan.....	29
4.1.4.	Perekonomian Kota Blitar.....	30
4.1.5.	Sarana.....	31
4.2.	Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Blitar.....	33
4.3.	Maksud dan Tujuan.....	36
4.4.	Struktur Organisasi, Tugasdan fungsi Dinas Pendidikan.....	37

4.5. Pembahasan.....48

V. PENUTUP.....66

5.1. Kesimpulan.....66

5.2. Saran.....68

VI. DAFTAR PUSTAKA.....70

VII. LAMPIRAN.....71



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	24
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan.....	31
Tabel 4.2 fasilitas Pendidikan Diperinci Tiap Kecamatan.....	33



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 input – program & kegiatan – output & outcome..... 9

Bagan 2.1 Alur Pikir Peneliti..... 15



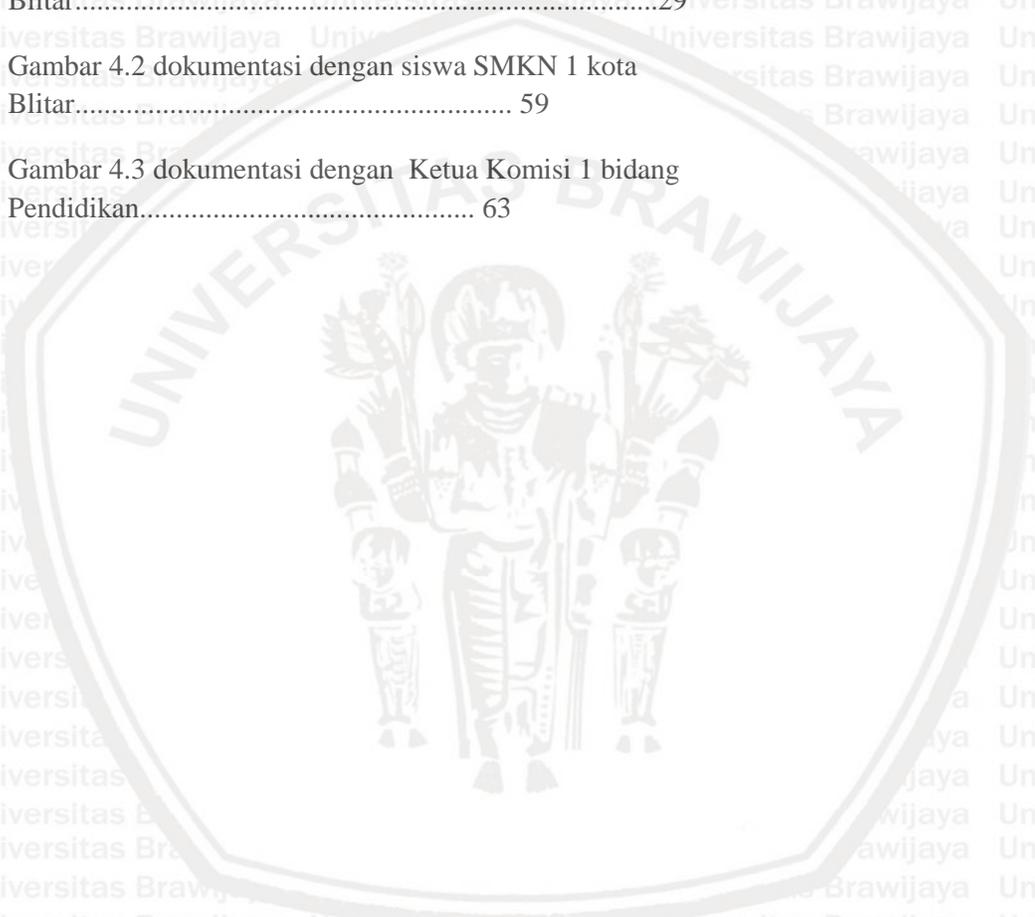
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Kualitatif Miles dan Hubermas..... 27

Gambar 4.1 Peta Batas Administrasi Kota Blitar.....29

Gambar 4.2 dokumentasi dengan siswa SMKN 1 kota Blitar..... 59

Gambar 4.3 dokumentasi dengan Ketua Komisi 1 bidang Pendidikan..... 63



DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Perencanaan Belanja Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FUNDAMENTAL	: Ekonomi
GOOD GOVERNANCE	: Pemerintahan yang baik
INFORMAN	: Orang- orang dalam penelitian untuk sumber informasi
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KKNI	: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
LITERATURE	: Sumber karya ilmiah yang digunakan untuk karya tulis
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTS	: madrasah Tsanawiah
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PARTISIPATIF	: Pengamatan yang melibatkan peneliti.
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PEMKOT	: Pemerintah Kota
PERMENDIKNAS	: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
PERWALI	: Peraturan Walikota
PKW	: Pusat Kegiatan Wilayah
POKJA	: Kelompok Kerja
PURPOSIVE SAMPLING	: Pengambilan data secara random
RENSTRA	: Rencana Kerja Strategis
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SISTEMATIS	: Suatu sistem yang berurutan
SKEPTIS	: Keraguan akan kebenaran suatu hal
SNP	: Standart Nasional Pendidikan
SWP	: Satuan Wilayah Pembangunan
UUD	: Undang-Undang Dasar

BAB 1**PENDAHULUAN****1. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah merupakan negara hukum yang berdasarkan Undang-undang Dasar dan Pancasila. Negara Indonesia juga merupakan negara berkembang yang saat ini berada dalam tahap pembangunan di segala bidang, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kesejahteraan umum demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia dalam mewujudkan pembangunan tersebut memerlukan adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah serta seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalian potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan

masyarakat¹, hal ini merupakan dasar pelaksanaan otonomi kepada daerah yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan juga bertanggung jawab. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah membawa dampak yang luas dalam sistem pemerintahan yang disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah kabupaten dan kota, yang dapat diartikan bahwa kemajuan pendidikan nasional dimasa mendatang sangat tergantung dari perhatian pemerintah kabupaten/kota terhadap sektor pendidikan di daerah masing-masing.

Desentralisasi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berarti penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia². Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan umum. Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana undang-undang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah menjadi lebih mandiri.

Pemerintah pada dasarnya merupakan organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa

¹ Kaloh J. *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kekuasaan, Kegiatan dan Prilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, 2009. Sinar Grafika hlm 67

² Mirim Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 2008

peningkatan keamanan, peningkatan pendidikan atau mutu kesehatan dan lain-lain, oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemerintah pusat memberlakukan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hal tersebut maka peran pemerintah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). ada tiga prinsip dalam penyelenggaraan *good governance*. Ketiga prinsip dasar tersebut adalah

1. Transparansi mengandung arti keterbukaan. Transparansi pemerintah dalam menjalankan manajemen pemerintahan, ekonomi, sosial dan politik
2. Partisipasi dapat dikategorikan turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan yang bersifat demokratis, pengakuan hak asasi manusia, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan pers dan mengakomodasi atau menampung aspirasi masyarakat

3. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban. Mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan.

Berkaitan dengan kinerja Pemerintah Daerah Kota Blitar dapat dilihat dari keberhasilan mengelola keuangannya, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki.

Dalam strategi pembangunannya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), APBD Kota Blitar benar-benar pro rakyat dengan memberikan anggaran yang lebih demi kepentingan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Walikota Blitar. Ada enam kelompok kerja (pokja) yang diterapkan masing-masing pokja pendidikan, pokja kesehatan, pokja ekonomi dan pengentasan kemiskinan, pokja tata kelola pemerintahan, pokja lingkungan hidup serta pokja budaya dan pariwisata.

Pendidikan tidak hanya menjadi sektor pelayanan publik yang dapat meningkatkan pertumbuhan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan.

Pendidikan berkualitas merupakan upaya melahirkan individu terpelajar sebagai persiapan memasuki persaingan antar bangsa yang demikian ketat dan berpengaruh terhadap semua dimensi kehidupan. Pendidikan yang berkualitas

akan menentukan kualitas suatu bangsa dan sangat berpengaruh dalam proses transformasi menuju bangsa yang maju, modern, dan bermartabat.

Pendidikan di Kota Blitar harus terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Berdasarkan pengertian tersebut bisa dipahami sangat pentingnya pendidikan agar suasana belajar dan proses pembelajaran di Kota Blitar bisa berjalan secara optimal. Dengan terbentuknya proses dan suasana tersebut, peserta didik akan aktif dalam mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya, maka akan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak yang mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk meningkatkan potensi pendidikan di Kota Blitar, Walikota Blitar membuat terobosan-terobosan yang dinilai sangat menuntungkan khususnya siswa asli Kota Blitar supaya semakin bersemangat untuk bersekolah antara lain³ :

1. Bus antar jemput gratis
2. Seragam sekolah
3. Alat tulis
4. Sepatu, kaos kaki
5. Tablet khusus bagi siswa berprestasi
6. Sumbangan pendidikan gratis

³ Pramono Anung, "Inovasi Walikota Kobi", *Membedah Kinerja Dan Inovasi Walikota Blitar Dalam Menerapkan APBD PRO RAKYAT*. Blitar Desember 2016

Khusus fasilitas antar-jemput gratis tidak hanya dinikmati oleh pelajar Kota Blitar, tetapi juga siswa dari Kabupaten Blitar. Siswa yang tercatat sebagai warga kota seluruh kebutuhan sekolahnya sudah dibiayai APBD, dengan digratiskannya semua biaya sekolah diharapkan seluruh siswa semakin fokus belajar karena seluruh tas, sepatu, seragam dan buku-buku juga tidak perlu dibeli lagi. Dan dampak bagi digratiskannya semua perlengkapan sekolah melalui APBD sejak 2011 membuat sekolah lebih fokus dalam meningkatkan kualitas serta memacu prestasi siswanya, siswa juga menjadi lebih disiplin dan tidak ada alasan untuk absen karena menunggak biaya sekolah. Termasuk orangtua dengan adanya pendidikan gratis, orangtua tinggal fokus dalam mencari nafkah dan menunjang kebutuhan referensi buku bagi anak-anaknya. Pendidikan merupakan kerangka dasar bagi pembangunan nasional, karena dengan pendidikan yang bermutu dapat diciptakan sumber daya manusia yang bermutu. Sumber daya manusia ini merupakan aktor utama penggerak pembangunan nasional, oleh karena itu pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi pembangunan wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana mengukur kinerja APBD Kota Blitar tahun 2010-2016 di sektor pendidikan yang diformulasikan untuk fasilitas bus gratis, seragam sekolah, alat tulis, sepatu, kaos kaki dan tablet?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan mendapatkan hasil dari tentang bagaimana penerapan pengukuran anggaran APBD yang berbasis kinerja yang diformulssikan unntuk pendidikan di Kota Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat terbagi menjadi manfaat akademis dan manfaat praktis, antara lain:

Manfaat akademis

1. Memperoleh pemahaman baru yang ditemukan oleh peneliti dalam melakukan penelitisn dilapangan.
2. Memperoleh pengembangan pengetahuan tentang analisis kebijakan publik yang diajarkan dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Manfaat praktis

1. Memperoleh hasil penelitian yang dapat mejadikan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Blitar untuk menjalankan peranya secara maximal, bukan hanya mengikuti aturan-aturan yang ada namun dapat berinovasi guna untuk menyejahterakan masyarakatnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dibagi menjadi tiga sub - bab. *Pertama*, berisi tentang konsep “VALUE FOR MONEY” yang digunakan sebagai pisau analisis dalam mendukung peneliti melakukan penelitian. *Kedua*, berisi tentang studi terdahulu yang akan menjadi pembeda skripsi ini dengan studi terdahulu. Selanjutnya *Ketiga*, akan menjelaskan alur pikir peneliti dalam melakukan penelitian.

1.1 Konsep Value For Money

Tuntutan terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) kepada pemerintah semakin mengemuka, tidak terkecuali terhadap Departemen Keuangan. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya antara lain transparansi penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas serta tujuan yang jelas dengan penerapan anggaran berbasis kinerja oleh karena itu diperlukan keseriusan dari segenap aparat pemerintah untuk membenahi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

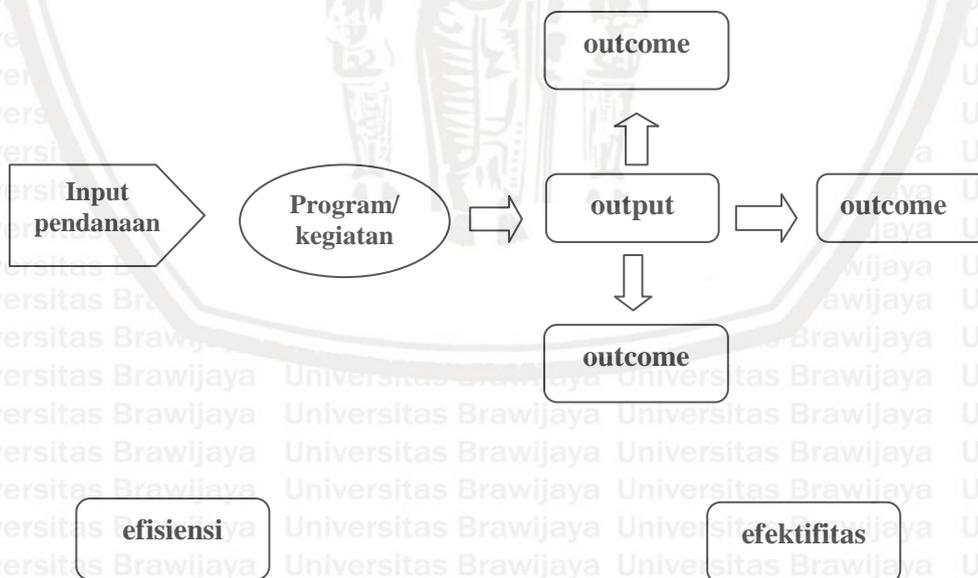
Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja sehingga dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut yang merupakan kunci pengelolaan

secara efektif dan jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya dapat dilakukan evaluasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program tersebut.

Keunggulan anggaran berbasis kinerja, adalah bahwa penyusunan anggaran ini dilakukan dengan mendasarkan pada program, fungsi serta aktivitas dengan menetapkan satuan pengukuran tertentu dan tujuan yang telah dirumuskan sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan kinerja kegiatan.

Dengan penerapan anggaran berbasis kinerja ini diharapkan menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif.

Bagan 2.1 input – program & kegiatan – output & outcome



Sumber : Yunita angraini dan Hendra puranta 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komperhensif* (edisi pertama). Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN



Pada konsep *Value For Money* ada tiga elemen penting meliputi : (a) Ekonomis, (b) Efisien, (c) Efektif.¹ Pengukuran kinerja *value for money* adalah bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik, yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang bahwa artinya setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya. Pengukuran kinerja bisa digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas dan setiap aktivitas itu harus dapat diketahui tingkat efektif dan efisiennya. Efisiensi dan efektivitas menjadi dasar untuk melakukan penilaian kerja dalam organisasi sektor publik.

a. Ekonomis

Ekonomis bisa diartikan sebagai pemerolehan input (biaya) dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga terendah atau yang berarti meminimalkan penggunaan sumberdaya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Konsep ekonomis ini sangat berkaitan dengan biaya, atau dalam arti segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sehingga menghasilkan keluaran. Input dapat berupa anggaran/dana, peralatan/teknologi, sumber daya manusia, material yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

¹ Mardiasmo. *Aspek Pengendalian dan Pengukuran Kinerja dalam Anggaran Berbasis Kinerja*, 2002, Erlangga, hlm 172

b. Efisien

Efisien yang dimaksud dalam hal ini adalah meminimalkan input (biaya), guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam praktiknya dapat diartikan melaksanakan segala sesuatunya dengan benar. Jika ekonomis lebih berfokus pada bagaimana memperoleh biaya atau harga, oleh karena itu efisiensi lebih terkait dengan hubungan antara input dengan output yakni hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumberdaya atau input yang dipergunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu program atau kegiatan dikatakan efisien jika program tersebut mampu menghasilkan output tertentu serendah-rendahnya atau dengan input tertentu menghasilkan output sebesar-besarnya.

c. Efektivitas

Efektif bisa diartikan mencapai suatu tujuan dan sasaran dengan target yang sudah ditetapkan secara maksimal. Dalam praktiknya berarti melakukan suatu hal yang benar. Dengan demikian efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas juga merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input, efisiensi pada output atau proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu kegiatan atau program diartikan efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas² :

1. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa.
2. Kualitas barang atau jasa, seberapa baik barang atau jasa yang diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan.
3. Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan.
4. Efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

1.2 Studi Terdahulu

Konsep *value for maney* merupakan sebuah konsep yang di anggap bisa menjelaskan tentang bagaimana inti pengukuran suatu capaian kinerja pada organisasi pemerintah. Konsep ini sudah dipakai dalam penelitian dibidang ekonomi, sosial, bahkan politik. Peneliti menggunakan konsep ini dengan empat penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan dan memastikan bahwa penelitian ini dibuat tidak sama dengan penelitian terdahulu Berikut ini adalah penjelasan tentang studi terdahulu, yang mana berisi tentang penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penjelasan sebagai berikut:

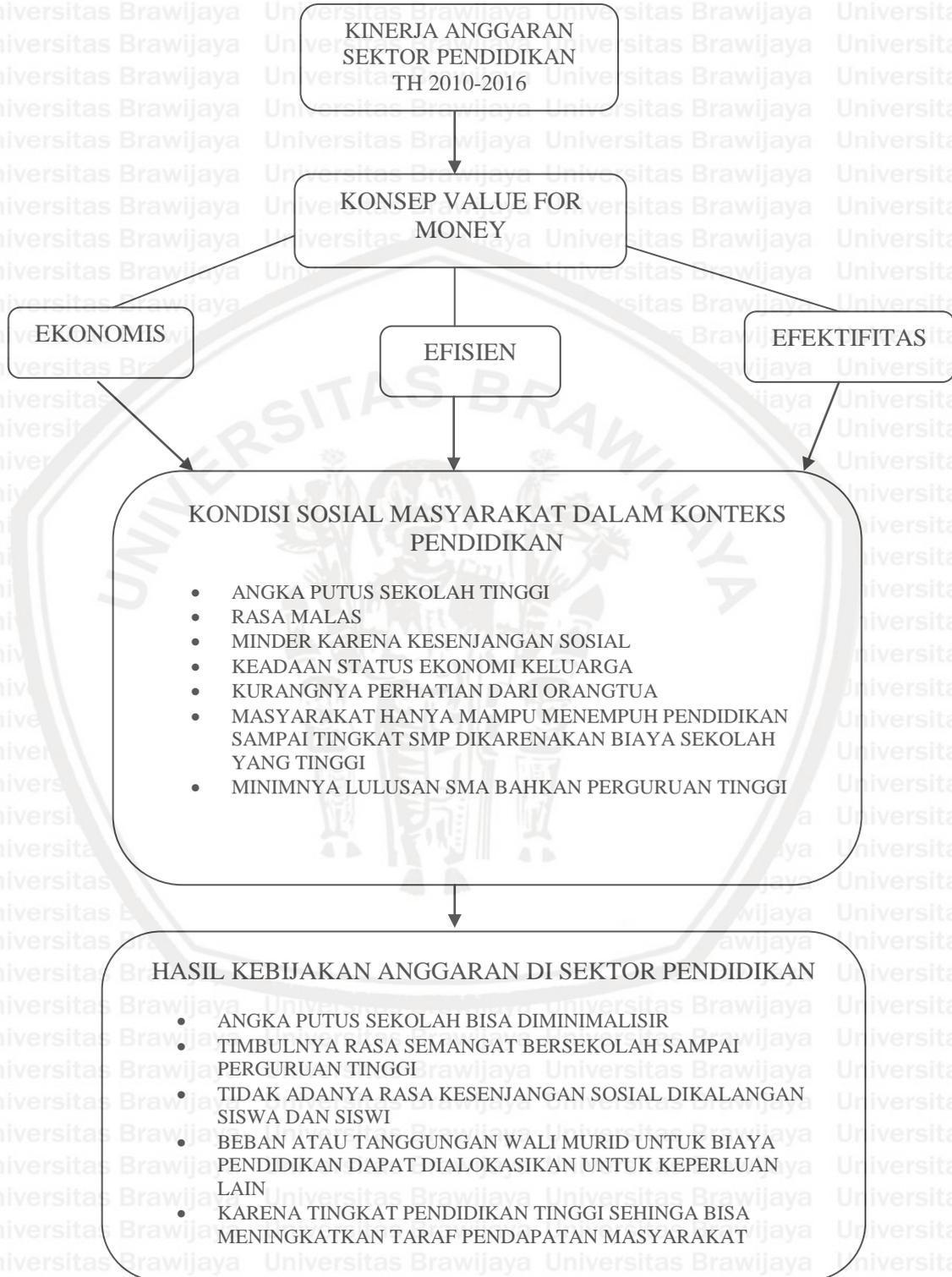
² Yunita angraini & Hendra puranta. *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komperhensif* (edisi pertama). Yogyakarta. 2010 hlm 178

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No	Nama	Isi	Pembeda
1.	Kajian Pemanfaatan APBD Untuk Sektor Pendidikan Di Provinsi Aceh. Ditulis oleh Putra Riyansah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika dan pengalokasian pembiayaan disektor pendidikan dalam kurun waktu 2007 hingga 2011.	Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan memberikan gambaran wilayah penelitian sesuai dengan unit analisisnya.
2.	Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Ditulis oleh Sri Indah Nikensari, SE,M.Si	Mengetahui variabel – variabel pengeluaran pada sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)	Penelitian ini berfokus pada membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan, penelitian ini bersifat kauntitatif.
3.	Jurnal evaluasi trend kualitas pendidikan di Indonesia, ditulis oleh Sabar Budi Raharjo	Informasi tentang tanggapan dan kelayakan satuan pendidikan terhadap penerapan delapan standar nasional pendidikan (SNP), trend kualitas pendidikan, status akreditasi sekolah, tingkat pemenuhan, rasional dan tanggapan terhadap SNP, urutan delapan standar nasional yang harus dicapai, standar nasional yang paling sulit dicapai, tingkat kepuasan peserta didik.	Penelitian ini berfokus pada bagaimana satuan pendidikan menrapkan standar pendidikan guna meningkatkan kepuasan terhadap peserta didik, metode yang digunakan dalam penelitian ini kaunitatif.

Bagan 2.1 Alur Pikir Peneliti



Sumber : Diolah oleh peneliti 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam suatu penelitian merupakan salah satu bagian pokok dan sarat untuk mencapai kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Suatu metode dapat dikatakan baik dan efektif, bilamana metode itu sesuai dengan objek serta situasi dan kondisi dalam penelitian.

1.1 jenis penelitian

jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong pengertian dari deskriptif adalah data yang berupa gambaran, kata-kata, dan bukan angka. Sehingga dapat dijelaskan bahwa penelitian deskriptif didapatkan dari wawancara, catatan, dari lapangan, foto, video tape, naskah, dokumentasi pribadi, catatan\memo serta dokumen resmi lainnya.¹

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dari ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Menurut Strauss dan Corbain dalam cresswell, J. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang

¹ Lexy.J.Moleong.Metode Penelitian Kualitatif.Bandung.RemajaRosdakarya.1989.hlm.6

tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi.²

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong yang mengatakan “ metodologi kualitatif ” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, atau dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.³ Deskriptif adalah laporan yang berisi tentang kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumentasi resmi lainnya.

Berdasarkan definisi di atas maka bisa jika digunakan untuk menjelaskan tentang rasionalitas dalam mengukur kinerja anggaran APBD Kota Blitar tahun 2010-2015 disektor pendidikan yang diformulasikan untuk fasilitas bus gratis, seragam sekolah, alat tulis, sepatu, kaos kaki dan tablet. Dimana dalam penelitian ini peneliti akan langsung berhubungan langsung dengan tiap individu yang akan diteliti.

1.2 fokus penelitian

penelitian dilakukan di Kota Blitar, penelitian ini mengambil fokus terbentuknya pengukuran anggaran APBD yang berbasis kinerja di Kota Blitar disektor pendidikan pada tahun 2010 – 2017.

² Cresswell. W. Jhon. *Qualitative inquiry and research design: Chossing Among Five Traditions* London: SAGE Publication. 1998. Hal 24

³ Lexy.J.Moleong

1.3 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan aspek penting dalam sumber persyaratan utama bagi keberhasilan pelaksanaan penelitian. Sumber data utama adalah penelitian kualitatif adalah kata- kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. Pada dasarnya penjenisan data sangatlah berfariatif. Tetapi bila dilihat dari derajat sumbernya data atau asal diperolehnya, data dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.⁴ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi.

b. Data Sekunder

Jika data primer informasi atau datanya diambil dari sumber asli. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua (bukan orang pertama, bukan orang asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Dapat juga diartikan data yang berasal dari sumber kedua yang datanya bisa berupa dokumen maupun peratauran perundang – undangan.

⁴ Muhamad idrus. *Metode Penelitian Sosial pendekatan kualitatif dan Kuantitatif EdisiKe Dua*. Penerbit Erlangga. Jakarta 2009, hlm 87

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berikut ini adalah penjelasan tentang teknik pengumpulan data wawancara, observasi partisipan, dokumentasi, dan studi pustakaan.

1.4.1 Wawancara

Metode wawancara merupakan proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau prang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Metode wawancara ini bahwa disetiap penggunaan metode ini selalu muncul beberapa hal yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara.⁵

Peneliti dalam penelitian ini menggnakan metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada informan yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya, dibantu dengan adanya pedoman wawancara yang diajukan kepada informan dengan pertanyaan terbuka. “ adapun pengertian wawancara mendalam menurut Bugin adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam

⁵ Burhan Bungin. *Metodologi penelitian Sosial Surabaya*. Airlangga Univercity Press, 2001. Hlm 142

kehidupan sosial yang relative lama, dengan demikian ciri khas dari wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.⁶

1.4.2 Observasi Partisipan

Observasi atau pengamatan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan bisa terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif.

Maksudnya, pengamat terlibat adalah jenis pengamatan yang melibatkan peneliti.

Penelitian dalam kegiatan yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya sebagai peneliti.

Observasi partisipan mengacu pada model observasi yang dilakukan oleh seseorang peneliti setelah dia berhasil berperan menjadi partisipan di lokasi penelitian.⁷ Mengacu pada model observasi yang dilakukan oleh seorang peneliti setelah dia berhasil berperan menjadi partisipan di lokasi penelitian. Lebih lanjut lagi para ahli menjelaskan bahwa, dalam aspek tertentu semua penelitian sosial merupakan semacam observasi partisipan, karena peneliti tidak dapat meneliti realitas sosial tanpa menjadi bagian dari realitas itu sendiri. Oleh karena itu jelas bahwa observasi partisipan bukanlah sebuah teknik tertentu, namun sebagai sebuah model penelitian dengan ciri keterlibatan sang peneliti dengan realitas dunia itu sendiri.

⁶ Burhan Bungin. *Metodologi penelitian Sosial Surabaya*. Airlangga University Press, 2001. Hlm 142

⁷ Norman K Denzin, Yvonna S. Lincoln. *Hand Book of Qmalitative Research*. Penerjemah darianto dkk. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2009. Hlm 316

1.4.3 Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda, legger dan sebagainya.⁸ Selain itu menurut Hadari Nawawi metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip – arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyidikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data berupa :

1. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2010-2015.
2. BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Blitar tahun 2014
3. Peraturan Walikota Blitar No 15 tahun 2011 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
4. Peraturan Walikota Blitar No 3 tahun 2012 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
5. Peraturan Walikota Blitar No 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012.
6. Peraturan Walikota Blitar No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012.

⁸ Burhan Bungin Op. Cit hlm 133

1.4.4 Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk menggumpulkan informasi yang relevan dengan studi yang sedang dilakukan oleh peneliti. Menurut nazir, studi keputakaan adalah teknik pengumpulan data yang mengadakan studi penelahaan terhadap buku-buku, catatan-catatan, literature-literature, dan laporan-laporan yang ada dengan masalah yang sedang dipecahkan.⁹ Guna menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan literature berupa buku-buku, jurnal-jurnal, maupun penelitian terdahulu tentang pengukuran dan pengendalian kinerja anggaran yang berbasis kinerja.

1.5 Informan Penelitian

Peneliti menggunakan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Mengenai hal ini Arikunto menjelaskan bahwa “*purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan kepada random, strata atau daerah tetapi didasarkan kepada adanya tujuan tetentu”¹⁰. Dan menurut Sugiono *sampling purposif* merupakan “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.¹¹ Yang bisa diartikan setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih sengaja berdasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu. maksud dan pertimbangan pengambilan sampel penelitian ini adalah orang-orang yang paling mengetahui situasi sosial yang sedang diteliti dan selaras dengan tujuan penelitian. Pertimbangan yang pertama, adalah pelaku atau aktor yang

⁹ M Nazir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988. Hml 111

¹⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2002, hlm 117

¹¹ Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&I*. Bandung. Alfabeta. 201, hlm 85

menjadi fokus dari penelitian yaitu Wali Kota Blitar yang memiliki program sekolah gratis bagi seluruh siswa-siswi yang bertempat tinggal di kota. Kedua, yaitu orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan merasakan implementasi program dari walikota yaitu siswa dan wali murid kota Blitar.

Berdasarkan teknik sampling yang digunakan peneliti yaitu purpose sampling, maka peneliti akan memilih dan mengkategorikan informan menjadi dua yaitu:

1. Informan kunci

Informan kunci merupakan orang pertama yang menjadi sumber masalah dan dapat memberikan penjelasan awal tentang berbagai hal yang berkaitan tentang penelitian. Hal ini dilakukan apabila peneliti mengetahui informan yang akan menjadi objek atau subyek penelitian, informan penelitian bisa bersifat formal ataupun non formal.¹² Dalam hal ini informan kunci adalah bapak Samanhudi Anwar sebagai Wali Kota Blitar yang merupakan akses pertama pencetus program ini dan untuk bisa membantu membantu memberi saran untuk menemukan informan lainnya.

2. Informan utama

Informan utama dalam penelitian ini yaitu mereka yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, dan mereka adalah seluruh elemen masyarakat Kota Blitar yang merasakan program sekolah gratis dari pemerintah kota.

¹² Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&I*. Bandung. Alfabeta. 201, hlm 84.

Tabel 3.1 Daftar Informan

Informan	Jabatan	Nama	Tanggal
1. Informan Kunci	Ketua komisi 1 DPRD Kota Blitar Bidang Pendidikan tahun 2014 - 2019	Henry Pradigta Anwar	4 Juli 2017
	Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016	Mokhamad Sidik	6 Juli 2017
	Walikota Blitar tahun 2010 - 2015 , 2016 - 2021	Samanhudi Anwar	10 Juli 2017
2. Informan Utama	Bagian Humas dan Protokol Pemkot Blitar	Sigit Poernomo	12 Juli 2017
	Bagian Hukum dan Ortala Pemkot Blitar	Hardi Wijaya	12 juli 2017
	Bagian Anggaran Pemkot Blitar	Darul Efendi	12 Juli 2017
	Kepala Sekolah SMKN 1Kota Blitar	Sugiyadi	13 Juli 2017
	Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Blitar	Kateman	13 Juli 2017
	Wali Murid SMKN 1 Kota Blitar	Maratus Sholikhah	14 juli 2017
	Murid SMKN 1 Kota Blitar	Fawwas Amanullah	14 Juli 2017

Sumber : Diolah oleh Peneliti 2017

1.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data penelitian kualitatif Huberman dan miles mengajukan model analisis data yang disebutnya adalah sebagai model interaktif. Dimana model interaktif ini terdiri dari tiga hal yang utama yaitu:¹³

1. Reduksi data. reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. Dalam proses ini penelitian ini dapat peneliti uraikan secara bertahap. *Pertama*, peneliti memisahkan hasil temuan data di lapangan yang menunjang penulisan penelitian mulai dari dokumentasi berupa video, catatan-catatan, foto dan sebagainya, RPJMD Kota Blitar tahun 2010-2015, profil walikota Blitar sampai peraturan daerah yang berkaitan dengan pendidikan. Setelah itu, peneliti akan merangkum dan mengolah data yang berupa data-data awal atau kasar kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami. *Kedua*, peneliti menyusun satuan dalam wujud faktual sederhana yang berkaitan dengan fokus dan masalah yang diteliti. Langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu mempelajari semua jenis data yang sudah terkumpul. Penyusunan ini tidak hanya dalam bentuk kalimat faktual saja tetapi berupa paragraf penuh. *Ketiga*, setelah satuan

¹³ Muhamad idrus. *Metode Penelitian Sosial pendekatan kualitatif dan Kuantitatif Edisi Ke Dua*. Penerbit Erlangga. Jakarta 2009, hlm 150

diperoleh peneliti membuat koding untuk memberikan kode pada setiap satuan yang bertujuan agar dapat ditelusuri data atau satuan sumbernya.

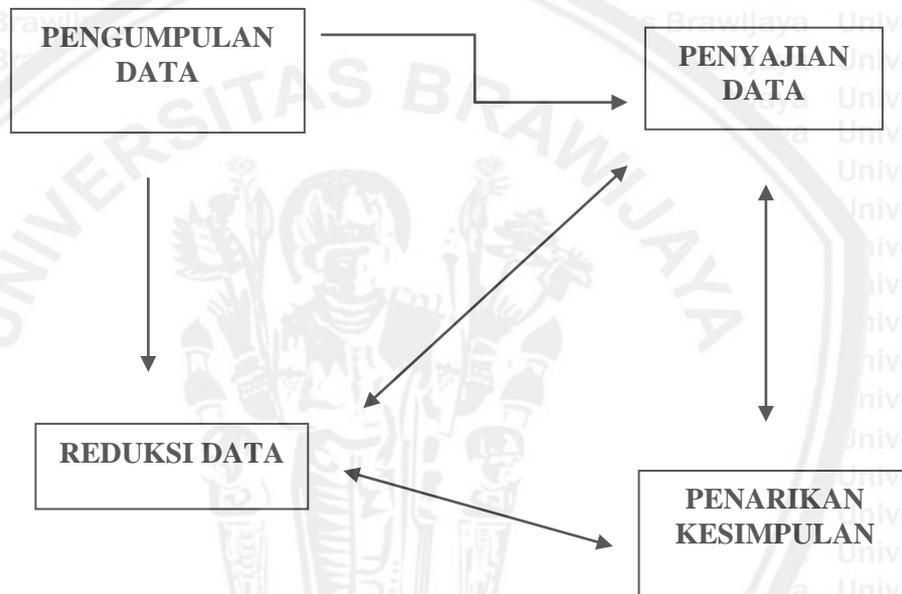
2. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data melalui penyajian data tersebut, maka data bisa terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan. Sehingga akan lebih mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Selain itu dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini dipaparkan sebagai teks yang bersifat naratif dan juga menyajikan data dalam bentuk gambar-gambar maupun diagram, tujuannya supaya memperjelas dan melengkapi sajian data.

3. Penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari dan mencatat keteraturan, pola-pola, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab-akibat dan proporsi. Seorang peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu secara longgar, tetap

terbuka dan skeptis (keraguan akan kebenaran sesuatu hal), akan tetapi kesimpulan telah disediakan.

Gambar 3.1

Teknik Analisis Data Kualitatif Miles dan Hubermas



Sumber : Muhamad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (edisi kedua). Jakarta. Erlangga.

BAB IV

Gambaran Umum Dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Gambaran Umum Kota Blitar

Bab ini menjelaskan tentang Kota Blitar yang merupakan kota merupakan pusat aglomerasi dari berbagai aktivitas sehingga memungkinkan suatu kota untuk berkembang, tumbuh, dan semakin maju. Kota Blitar yang sejak penerapan otonomi daerah yaitu tahun 2000 mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kota Blitar meskipun termasuk dalam kategori kota sedang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Selaras dengan itu, dalam RTRW Propinsi Jawa Timur, Kota Blitar ditetapkan sebagai pusat kegiatan dari Satuan Wilayah Pembangunan baru yaitu SWP Blitar yang telah dipisahkan dari SWP Kediri.¹ Dengan demikian ada beberapa tugas penting yang diemban Kota Blitar sebagai Pusat SWP, antara lain sebagai wilayah yang mampu memfasilitasi *hinterlandnya* (Kota Blitar) agar berkembang secara signifikan pula.

4.1.2 Letak Geografis dan Administrasi

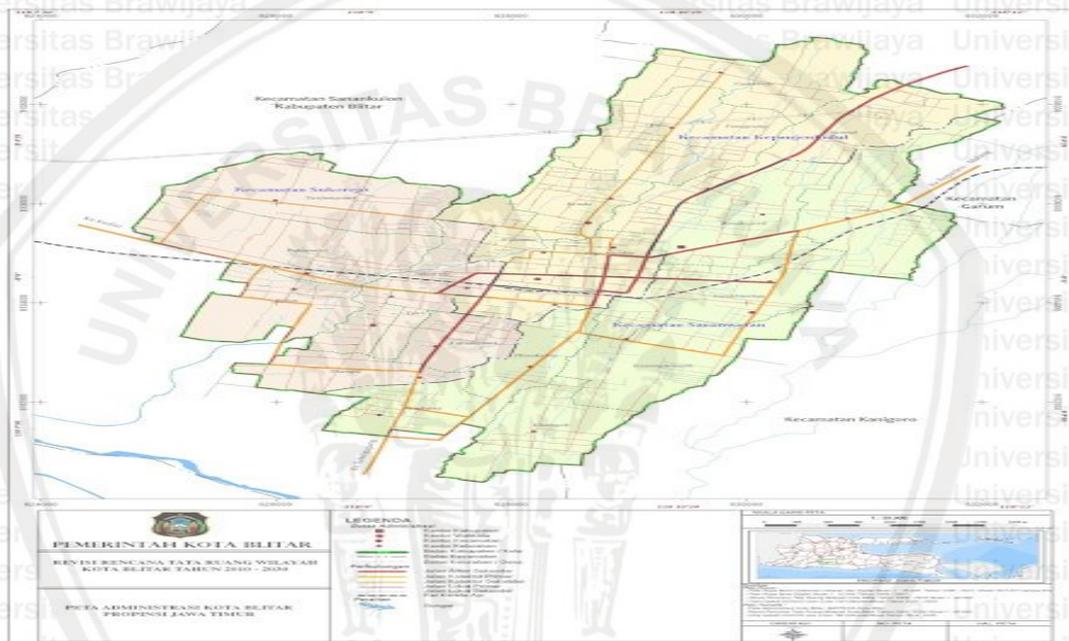
Kondisi gelogis dan letak geografis menyebabkan Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi sekaligus rawan bencana alam.

Secara geografis merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan

¹RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 -2021

empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Lempeng Samudra Hindia dan Pasifik. Kota Blitar merupakan ibu kota Blitar, secara geografis wilayah Kota Blitar terletak $112^{\circ}14'$ - $112^{\circ}28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ}2'$ - $8^{\circ}8'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah $\pm 32,58 \text{ km}^2$, yang dibagi dalam tiga wilayah Kecamatan (Sukorejo, Kepanjenkidul, dan Sananwetan).²

Gambar 4.1 Peta Batas Administrasi Kota Blitar



Sumber : BPS Kota Blitar Dalam Angka, 2014

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Sananwetan memiliki luas wilayah paling besar yaitu sebesar 12.1516 ha sedangkan luas wilayah paling kecil yakni Kecamatan Sukorejo yaitu sebesar 9.9247 ha.

² <https://blitarkota.bps.go.id/Subjek/view/id/153#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1> diakses pada 26 juli 2017. Pukul 23 05 Wib

4.1.3 Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Blitar tahun 2009 adalah 139.471 jiwa (meningkat sebesar 2.738 jiwa atau 2 (dua) persen dari tahun 2008).

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Sananwetan dengan jumlah penduduk sebesar 52.087 jiwa, diikuti Kecamatan Sukorejo sebesar 47.387 jiwa, dan yang terkecil adalah penduduk Kecamatan Kepanjenkidul 39.997 jiwa³. Jumlah penduduk Kota Blitar secara terperinci dapat dilihat pada garafik di bawah ini :

Grafik 4.1 Jumlah Penduduk Kota Blitar Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2009

Grafik 1. Jumlah Penduduk Kota Blitar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2009



Sumber: Pengelolaan Data Kota Blitar Dalam Angka, 2010

Sumber : Pengelolaan Data Kota Blitar Dalam Angka, 2010⁴

Berdasarkan diagram perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki (selisih 339 jiwa), sehingga

³ BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Blitar, hal 35

⁴ Pengelolaan Data Kota Blitar Dalam Angka, 2010

mempengaruhi jumlah penduduk yang cenderung meningkat karena penduduk perempuan berkontribusi terhadap angka kelahiran.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan faktor alami (Lahir dan Mati) di Kota Blitar 2.670 jiwa pada tahun 2016, dan penduduk berdasarkan faktor non alami (Datang dan Pergi) yaitu berjumlah 5.216 jiwa. Jumlah penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini⁵ :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Faktor Alami dan Non Alami Kota Blitar Tahun 2014

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Total
	Lahir	Mati	Datang	Pergi	
Sukorejo	398	420	886	746	2.450
Kepanjenkidul	395	351	803	696	2.245
Sananwetan	693	413	1.116	969	3.191
J u m l a h	1.486	1.184	2.805	2.411	7.886

Sumber : RPJMD Kota Blitar Dalam Angka, 2014⁶

4.1.4 Perekonomian Kota Blitar

Kegiatan ekonomi penduduk Kota Blitar beraneka ragam, antara lain kegiatan pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Kegiatan perdagangan berjalan cukup kondusif terutama yang berada di jalan-jalan utama yang ada di Kota Blitar. Selain bertumpu pada sektor pertanian juga terdapat sektor peternakan yang cukup berperan dalam perekonomian Kota Blitar seperti peternakan sapi perah, sapi potong, kuda, babi, kambing, dan

⁵ BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2016, hal 77

⁶ RPJMD Kota Blitar Dalam Angka, 2014

domba. Berbagai fasilitas perdagangan dan jasa skala besar yang tersedia di Kota Blitar, diantaranya pasar legi, pasar terpadu (pasar hewan), pusat agribisnis dan Ikan Hias, dan sebagainya. Sedangkan fasilitas skala lokal seperti pasar kecamatan, toko dan warung tersebar di seluruh wilayah Kota Blitar. Selain itu, lokasi kawasan industri cenderung mengelompok pada lingkungan perumahan berbentuk home industri dengan hasil kerajinan yang serupa seperti kerajinan tangan, pengolahan pangan, dan sebagainya.⁷

Untuk melihat keberhasilan pembangunan sektor ekonomi suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan PDRB per kapita daerah tersebut. Dilihat dari perkembangan PDRB Kota Blitar selama periode tahun 2005-2009 atas dasar harga berlaku PDRB per kapita cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya adalah sebesar 13,25%. Sementara jika dilihat berdasarkan harga konstan tahun 2000, pertumbuhan PDRB per kapita Kota Blitar tahun 2009 naik sebesar 5,31% yaitu sebesar Rp 5.465.959,00.⁸

4.1.5 Sarana

a. Permukiman

Perumahan mempunyai luas sekitar 1.178,24 Ha, dengan distribusi di Kecamatan Sukorejo seluas 371,74 Ha, Kepanjen Kidul 327,13 Ha, dan Sananwetan seluas 479,36 Ha. Kecenderungan berkembang perumahan di

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Blitar Dalam Angka 2014

⁸ *ibid*, Badan Pusat Statistik hlm 35

Kota Blitar adalah gabungan dari pola linier dan grid, dimana permukiman cenderung mengikuti jaringan jalan yang sudah ada dan menyebar mengikuti jalan lingkungan. Untuk perumahan yang berkembang pada sepanjang jalan utama kota cenderung berkembang secara memusat karena pada lokasi ini memiliki akses jalan yang baik dengan kelengkapan fasilitas, didukung juga dengan adanya pusat perdagangan dan jasa.

b. Pendidikan

Fasilitas pendidikan umum yang ada di Kota Blitar meliputi TK, SD, SMP dan SMA, serta fasilitas pendidikan agama mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta. Berikut merupakan peta persebaran pendidikan di Kota Blitar.

Tabel 4.2 Fasilitas Pendidikan Kota Blitar Diperinci Tiap Kecamatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Pendidikan Umum				Pendidikan Agama		
		TK	SD	SMP	SMA/SMK	MI	MTs	MA
1	Sukorejo	26	19	5	6	2	2	1
2	Kepanjenkidul	21	22	6	6	2	3	1
3	Sananwetan	35	34	10	10	2	-	-
	Jumlah	82	75	21	22	6	5	2

Sumber : BPS Kota Blitar Dalam Angka, 2014

Percepatan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kreasi teknologi dalam berbagai bidang mengakibatkan perubahan besar pada tatanan berbagai aspek kehidupan. Terjadinya revolusi digital membawa dampak yang luas pada berlangsungnya perubahan dalam aktivitas ekonomi, pola hubungan pada berbagai aspek kehidupan antar individu, antar kelompok masyarakat bahkan antar bangsa dan negara. Demikian pula membawa dampak luas pada perubahan tatanan sosial kemasyarakatan dan budaya, yang sebelumnya dianggap telah teknologi transportasi, komunikasi telah mengakibatkan dunia ini menjadi terintegrasi dengan aktivitas ekonomi dan internet serta pekerjaan dan pekerja pengetahuan. Dalam kondisi demikian dunia beserta kehidupannya dalam konteks ruang dan waktu berubah dengan sangat cepat. Kreativitas dan inovasi menjadi sangat penting dalam menentukan eksistensi individu, organisasi dan masyarakat dan bahkan bangsa.

4.2.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Blitar

Kecenderungan global yang membawa perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan, berimplikasi pada kepentingan untuk merancang strategi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan menjadi suatu keniscayaan dalam menghadapi kecepatan gelombang perubahan yang berlangsung sejak awal Abad XXI dan akan terus berlanjut pada masa-masa berikutnya. Terkait dengan hal tersebut di tingkat dunia diamanatkan berbagai program pendidikan diantaranya: dasawarsa pendidikan untuk semua (*education for*

all), literasi dunia (*the world literacy*), pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan (*education for sustainability development*), dan konvensi internasional pembangunan milenium (*millennium development goals*)⁹ yang mencakup pula bidang pendidikan. Perubahan yang berlangsung juga menumbuhkan kecenderungan semakin pentingnya pendidikan selama hayat (*lifelong learning*); pendidikan lebih diorientasikan pada pengembangan kompetensi; bergesernya pengajaran ke arah pembelajaran (*student centered learning*), dan pentingnya pengembangan alternatif alternatif kecerdasan yang bersifat majemuk dalam pelaksanaan pendidikan.

Selain itu juga muncul kecenderungan berkembangnya tuntutan ukuran bertaraf dunia bagi pendidikan (*world class schools, world class university*) dan semakin berkembangnya tuntutan terciptanya penjaminan dan pemeliharaan mutu pendidikan, yang pada akhirnya menumbuhkan perumusan kerangka kualifikasi internasional (*international qualification framework*) dalam dunia pendidikan.¹⁰ Meskipun terlambat, Indonesia telah meresponnya dengan menerbitkan Perpres No 8 tahun 2012 tentang

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Berbagai perubahan yang berlangsung sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implikasinya dalam dunia pendidikan, menuntut pengembangan perencanaan yang cermat dalam membangun dunia pendidikan di Indonesia pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

⁹ Majalah Peluang Edisi 2, 1juni – juli 2016 yang diupload oleh www.blitarkota.go.id diakses pada tanggal 27 juli 2017 pukul 01.19 Wib

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kota Blitar tahun 2015

dalam kehidupan masyarakat dunia. Dorongan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna menjawab tantangan persaingan global, seharusnya tetap ditempatkan dalam bingkai jati diri bangsa. Dengan demikian kemajuan yang dicapai dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia, tidak membuat bangsa ini terhanyut oleh arus budaya dan perilaku asing, serta mengabaikan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi budaya bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka seharusnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelaksanaannya tetap dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta semangat Bhineka Tunggal Ika dan komitmen atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016 - 2021 ini, dikembangkan dan disusun dengan mempertimbangkan dan berpedoman pada¹¹:

- a. Permendiknas Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Renstra Kemdiknas tahun 2010-2014 beserta lampirannya
- b. Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2011 - 2015;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 (sampai saat naskah ini disusun RPJMD yang dimaksud masih berupa rancangan dan belum disahkan sebagai Peraturan Daerah); dan Lebih Lanjut dalam penyusunan perencanaan strategik diperlukan bahan kajian seperti berikut :

¹¹ RPJMD Kota Blitar tahun 2016

1) Perhatian terhadap perencanaan yang dibuat dan keterpaduannya Dengan proses yang ditetapkan untuk menjamin keberhasilan pencapaiannya; dan Kehati-hatian dalam menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik serta menentukan langkah-langkah tindakan secara terbuka dan juga kehati-hatian dalam memanfaatkan pandangan kelompok pemangku kepentingan utama. Penyusunan Renstra periode 2016 - 2021 pada prinsipnya pada saat ini masih akan dilakukan revisi karena landasan yang dijadikan dasar penyusunan Renstra belum tersedia, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021., ditetapkan bahwa Renstra SKPD termasuk Dinas Pendidikan, harus didasarkan pada RPJMD. Oleh karena itu dalam penyusunan renstra ini, diperlukan penyesuaian target menjadi penyiapan kerangka dasar rancangan Renstra serta pengumpulan dan pengolahan data termasuk informasi pendukung lainnya, yang akan disempurnakan. Berikut adalah skema hubungan antar dokumen perencanaan antara dokumen RPJMD dan Renstra SKPD.¹²

4.3.1 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2010-2015 adalah untuk menjabarkan visi, misi pemerintah kota dan program kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar pada tahun 2016-2021 dalam sebuah dokumen perencanaan pendidikan sebagai acuan

¹² RPJMD Kota Blitar tahun 2016 - 2021

dan tolok ukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsisekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2010-2015 adalah :¹³

- a. Memberikan arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan pendidikan pada tahun anggaran 2010-2015 ;
- b. Sebagai acuan berbagai pihak dalam menetapkan kebijakan pembangunan pendidikan pada tahun 2010-2015 jawaban dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.

4.4.1 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Blitar

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No. 25 Tahun 2014, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan struktur organisasi sebagai berikut¹⁴:

Berdasarkan bagan di atas Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :

¹³ Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar tahun 2015

¹⁴ Ibid, hal 35

- 1) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar;
- 2) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Menengah.

d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :

- 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar ;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.

Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:

- 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah ;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.

Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) dan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) membawahi :

1. Seksi Pendidikan Non Formal (PNF);
2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Khusus.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Perwali tersebut,

Dinas Pendidikan melaksanakan fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundangundangan
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan ;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;

- e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- f. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- g. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- h. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- i. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah ;
- j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

A. Kinerja Pelayanan SKPD.

Pokok-pokok kebijakan strategis, program, sasaran, serta strategi pelaksanaan pembangunan pendidikan yang dirancang dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar sebelumnya disusun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan dalam lingkungan strategis agar sasaran lima tahun ke depan lebih realistis dan konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, dan demokratis. Dari hasil pelaksanaan strategi pencapaian visi sebagaimana yang telah disusun

sebelumnya, gambaran layanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program PAUD pertama telah diarahkan untuk memperkuat aksesibilitas warga masyarakat dalam mendapatkan pendidikan di PAUD. Kegiatannya meliputi sosialisasi PAUD, bantuan Alat Permainan Edukatif (APE), bantuan biaya penyelenggaraan PAUD, dan bantuan tambahan penghasilan guru PAUD. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan dorongan kepada masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat yang peduli dan memiliki kualifikasi sebagai penyelenggara PAUD untuk berpartisipasi membuka dan menyelenggarakan PAUD¹⁵.

Bantuan biaya penyelenggaraan PAUD dimaksudkan untuk membantu meringankan biaya penyelenggaraan pendidikan, sedangkan bantuan tambahan penghasilan bagi guru PAUD dimaksudkan untuk memberikan penghargaan dan memberikan motivasi kepada guru PAUD di dalam mendidik anak didiknya. Arah kedua dari pelaksanaan program PAUD adalah untuk meningkatkan pengelolaan lembaga PAUD. Wujud dari kegiatan peningkatan pengelolaan lembaga PAUD adalah kegiatan bimbingan teknis tentang pengelolaan PAUD bagi kepala dan guru PAUD¹⁶. Meskipun kegiatan sebagaimana diuraikan di atas tidak seluruhnya dilaksanakan secara periodik dalam arti setiap tahun anggaran dilaksanakan, hasil dari kegiatan-kegiatan

¹⁵ Pramono Anung, "Inovasi Walikota Kobo", *Membedah Kinerja Dan Inovasi Walikota Blitar Dalam Menerapkan APBD PRO RAKYAT*. Blitar Desember 2016

¹⁶ Pramono Anung, *ibid* hal 25

tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah lembaga PAUD dan Angka Partisipasi Kasar PAUD. Berdasarkan data yang tersedia, dapat diketahui bahwa jumlah lembaga PAUD yang semula berjumlah 69 lembaga pada tahun 2011 pada tahun 2015 bertambah menjadi 152 lembaga. Sedangkan APK PAUD pada tahun 2011 sebesar 53,91 % kondisi pada akhir tahun 2015 menjadi 76,68%.¹⁷

B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa Program Pendidikan Dasar sasaran kegiatannya mencakup penyelenggaraan pendidikan di SD/MI, SMP/MTs. Sejalan dengan tuntutan sasaran indikatif yang diamanatkan di dalam RPJMD Kota Blitar sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun selama 5 tahun sebelumnya utamanya diarahkan untuk merealisasikan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dan menengah sebesar 100 %.¹⁸ Guna mencapai kondisi tersebut kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas, pemberian bea siswa retriavel bagi siswa miskin, pemberian bantuan terhadap sekolah kritis, pemberian bantuan Biaya Operasional Sekolah, bantuan tambahan penghasilan bagi guru dan pegawai swasta, bantuan buku pelajaran, bantuan peralatan sekolah, serta bantuan dana operasional pendidikan (DOP). Agar dapat bejalan seimbang antara peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan Program Wajib Belajar 9 tahun juga diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

¹⁷ RPJMD Kota Blitar tahun 2015

¹⁸ Pramono Anung, "Inovasi Walikota Kobo", *Membedah Kinerja Dan Inovasi Walikota Blitar Dalam Menerapkan APBD PRO RAKYAT*. Blitar Desember 2016

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan selama 5 tahun sebelumnya antara lain adalah, pembangunan/rehabilitasi ruang perpustakaan dan laboratorium, pengadaan buku referensi dan buku pengayaan, pengadaan alat peraga dan praktek, pengadaan alat dan pendukung teknologi informasi, pemberian bimbingan belajar, pembinaan bakat dan prestasi, serta mengikuti berbagai festival dan perlombaan baik yang bersifat akademis maupun non akademis baik berskala regional, nasional maupun internasional. Kegiatan lain dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan menuju pengelolaan pendidikan yang berbasis sekolah atau Manajemen Berbasis Sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi penilaian kinerja sekolah, bimbingan teknis pengelolaan sekolah, dan mengikutsertakan para pengelola sekolah dalam kegiatan pelatihan/*workshop*/seminar/ lokakarya tentang pengelolaan SD, SMP dan SMA/SMK baik di tingkat propinsi maupun di tingkat nasional¹⁹. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, dapat dilihat dari peningkatan perolehan APM untuk tingkat SD dari target 100% terealisasi 95,89 % di tahun 2015 dan APM SMP dari target 100% terealisasi 90,31%.²⁰

C. Program Pendidikan Menengah

Sama halnya dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, kegiatan-kegiatan Program Pendidikan Menengah juga diarahkan untuk memberikan keluasan aksesibilitas penduduk untuk

¹⁹ Wawancara Samanhudi Anwar Walikota Blitar 10 juli 2017. Pukul 11.20 Wib

²⁰ RPJMD Kota Blitar 2010 - 2015

mengenyam pendidikan sampai dengan SLTA. Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemberian bantuan khusus siswa miskin (BKSM), pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, serta pemberian bantuan buku pelajaran. Sedangkan kegiatan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan dengan jalan memberikan bimbingan belajar, pengadaan alat peraga dan praktek, mengikuti berbagai festival dan perlombaan, baik akademis maupun non akdemis di tingkat propinsi dan nasional, serta melaksanakan pembangunan/rehabilitasi ruang perpustakaan/laboratorium/ bengkel/praktek. Disamping itu kegiatan-kegiatan dalam Program Pendidikan Menengah juga diarahkan untuk peningkatan manajemen di sekolah melalui bimbingan teknis pengelolaan pendidikan di SLTA dan mengikutsertakan para pengelola lembaga pendidikan di SLTA dalam kegiatan pelatihan/ *workshop*/ seminar/ lokakarya tentang pengelolaan SLTA baik di tingkat propinsi maupun di tingkat nasional.²¹

Dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pendidikan Menengah ini, satu sisi terdapat peningkatan yang sangat berarti pada beberapa indikator, namun di sisi lain, terdapat sedikit penurunan pada salah satu indikator. Indikator yang mengalami peningkatan yang sangat berarti adalah peningkatan capaian APM dan peningkatan Ratarata Nilai Ujian Nasional. Capaian APM pendidikan menengah dari 63,67% meningkat secara fantastis pada tahun 2015 yaitu sebesar 109,24%, sedangkan capaian Rata-rata Nilai Ujian Nasional dari 6,30 menjadi 6,75 di tahun 2015

²¹ Pramono Anung, "Inovasi Walikota Kobi", *Membedah Kinerja Dan Inovasi Walikota Blitar Dalam Menerapkan APBD PRO RAKYAT*. Blitar Desember 2016

. Sementara itu indikator yang terjadi kenaikan lainnya adalah indikator Rata-rata Prosentase Kelulusan Ujian Nasional. Perolehan rata-rata prosentase kelulusan dari 91,85% menjadi 96,87% di tahun 2015²²

D. Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Non Formal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pelaksanaan program pembangunan pendidikan secara holistik. Dari pelaksanaan program Pendidikan Non Formal ini, telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap proses penyiapan sumber daya manusia yang kompetitif. Dari pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal ini pula, telah memberikan andil yang cukup berarti terhadap peningkatan aksesibilitas warga masyarakat dalam menempuh pendidikannya. Selama kurun waktu hampir lima tahun belakangan ini, pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal dilalui dengan jalan melaksanakan kegiatan Kelompok Belajar Paket B dan Kelompok Belajar Paket C, melaksanakan bimbingan teknis peningkatan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), bimbingan teknis peningkatan pengelolaan lembaga, dan melaksanakan kegiatan pemberantasan butu huruf melalui Kelompok Keaksaraan Fungsional²³. Dari pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal ini hasilnya telah dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, utamanya kelompok masyarakat yang belum dapat menempuh pendidikan formal sampai dengan tamat SMP dan SMA, disamping juga telah membantu menamatkan anak-anak SMP dan SLTA yang tidak lulus ujian nasionalnya.

²² Samanhudi Anwar . *“pendidikan gratis antara teori dan praktek”* Blitar 2015

²³ Samanhudi Anwar. *Ibid* hal 44

Indikator keberhasilan dari pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal yang paling menonjol adalah dengan berhasilnya angka melek huruf yang naik dari target 100% terealisasi 98,95% pada tahun 2015 dari total penduduk usia 15 tahun yaitu 114.520 orang yang bisa baca tulis berjumlah 113.318 orang dan yang tidak bisa 1.202 orang.²⁴

E. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan kegiatannya diarahkan pada peningkatan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, peningkatan kualifikasi akademis tenaga pendidik, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta peningkatan profesionalitas tenaga pendidik. Kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dilalui dengan jalan melaksanakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Penataran, *Workshop*, lokakarya, seminar dan sejenisnya baik di tingkat regional maupun secara nasional. Kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualifikasi akademis dilalui dengan jalan memberikan subsidi kepada guru yang melanjutkan ke jenjang S1. Kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan dijalani dengan melaksanakan penilaian angka kredit, pemberian insentif bagi guru swasta, pemberian bingkisan hara raya, dan pemberian jaminan kesehatan²⁵. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan profesionalitas tenaga pendidik dilalui dengan

²⁴ Pramono Anung, "Inovasi Walikota Kobo", *Membedah Kinerja Dan Inovasi Walikota Blitar Dalam Menerapkan APBD PRO RAKYAT*. Blitar Desember 2016

²⁵ Soyomukti Nuraini. "Teori – Teori Pendidikan : Tradisional, Liberal, Marxis-Sosialis, Posmodernis" Arruzmedia, Yogyakarta 2014

jalan memberikan fasilitas kepada guru yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat sertifikat sebagai guru profesional. Perkembangan data sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini adalah meningkatnya prosentase jumlah guru yang layak mengajar di tahun 2015 sebesar 97.54%

F. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pemberian layanan pendidikan kepada masyarakat semakin hari semakin bertambah baik adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pendidikan pada khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya. Sejalan dengan hal tersebut selama kurun waktu 5 tahun yang lalu, telah dilaksanakan kegiatan - kegiatan dalam rangka pelaksanaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di seluruh sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA, pelaksanaan sosialisasi dan implementasi *Citizen Charters*, bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan sekolah, mengikutsertakan kepala sekolah dalam penataran/*workshop*/lokakarya/seminar/diklat tentang manajemen sekolah, serta melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah²⁶.

Dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebut di atas, hasilnya adalah seluruh penyelenggara pendidikan (sekolah) yang terdapat di Kota Blitar telah memiliki kepengurusan komite sekolah. Hal ini menandakan

²⁶ Pemerintah Kota Blitar, "*himpunan pidato walikota blitar tahun*" 2010 – 2015

bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah telah dilaksanakan oleh sekolah. Hasil lain dari pelaksanaan program ini adalah dengan terdapatnya 3 sekolah yang telah melaksanakan sosialisasi tentang *Citizen Charters*' dan 1 sekolah yang telah mengimplementasikan *Citizen Charters*'. Disamping itu dari pelaksanaan program ini juga telah menghasilkan suatu proses penempatan, pengangkatan, dan penghargaan bagi guru dan kepala sekolah sebagai *follow up* dari pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah dan pelaksanaan aturan perundangan yang berlaku dan terciptanya system pendataan siswa yang lebih terarah, terpadu dan terharmonisasi²⁷.

G. Program Pendidikan Luar Biasa

Program ini untuk memwawahi sekolah yang melaksanakan dan atau menyelenggarakan pendidikan bagi anak anak berkebutuhan khusus untuk mencapai potensinya secara maksimal. Diharapkan dengan adanya program ini mereka dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya dan motivasi belajar mereka akan tumbuh dan berkembang. Keberhasilan program ini dibuktikan dengan keterikutsertaan siswa PLB pada ajang ajang lomba yang diselenggarakan oleh propinsi. Pada tahun 2015, siswa yang bernama Arif Rohman Hakim SMPLB-B YPLB Blitar menjadi juara harapan 3 lomba bulu tangkis sekota Blitar²⁸.

²⁷ Pemerintah Kota Blitar, "*Himpunan Pidato Walikota Blitar*" tahun 2010 - 2015

²⁸ Wawancara Mokhammad Sidik, tanggal 6 juli 2017 pukul 10.00 Wib

4.2 Pembahasan

Kebijakan pemerintah Kota Blitar terkait dengan Program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun diupayakan dapat memfasilitasi bagi warga yang kurang mampu namun berprestasi untuk dapat melanjutkan pendidikan baik di tingkat SLTA atau pun Perguruan tinggi, serta untuk mencapai sasaran di bidang pendidikan yaitu meningkatnya Pemerataan Pelayanan Pendidikan dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan²⁹. Program ini juga dimaksudkan untuk mendongkrak capaian APS (Angka Partisipasi Sekolah) pendidikan sebagaimana sejalan dengan Peraturan Pemerintah no. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar sebagai aturan lebih lanjut dari Undang – Undang no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya BAB VIII yang membahas tentang wajib belajar. Pada pasal 7 ayat 4 dari peraturan Pemerintah tersebut, secara explicit mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah³⁰.

Program ini bertujuan untuk: a) menggratiskan biaya operasi nonpersonalia sekolah dan sebagian biaya peserta didik bagi siswa SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/SMK, MA/SMALB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar, dan b) meringankan beban biaya operasional sekolah dan sebagian biaya pribadi peserta didik bagi siswa yang menuntut

²⁹ Pramono Anung, “Inovasi Walikota Kobi”, *Membedah Kinerja Dan Inovasi Walikota Blitar Dalam Menerapkan APBD PRO RAKYAT*. Blitar Desember 2016

³⁰ Mardiasmo. “Otonomi Daerah Berorientasi Kepada Kepentingan Publik”, Yogyakarta. 1999 hlm 57

ilmu di satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar yang bukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar. Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan peningkatan APM di Kota Blitar di tahun 2015 yaitu 95.89% untuk APM SD, 90.31 untuk APM SMP dan 80.22 untuk APM SMA. Dengan nilai angka kelulusan mencapai 100% di semua jenjang pendidikan³¹.

Penerapan pengukuran anggaran APBD yang berbasis kinerja yang diformulasikan untuk pendidikan di Kota Blitar. Hubungan Kinerja anggaran APBD yang diformulasikan untuk sektor pendidikan Gratis di Kota Blitar Tahun 2010-2015. Kebijakan terkait dengan pendidikan Gratis di Kota Blitar Tahun 2010-2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

Program APBD pro rakyat yang dicanangkan Pak Walikota, yang mana beliau pernah mengatakan kalau dana dari program tersebut, anggaran paling besar adalah untuk sektor pendidikan. Berapa tepatnya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar: Mokhamad Sidik S.Sos.,

M.AP, beliau mengatakan bahwa:

“Memang, memang dari awal tujuannya seperti itu. Seluruh warga kota Blitar dapat akses sekolah gratis, jadi program wajib belajar 9 tahun itu terpenuhi. Gak ada alasan untuk tidak tamat sekolah. Kalau untuk yang perguruan tinggi, kita pemerintah kota Blitar memang berkomitmen untuk memajukan potensi perguruan tinggi kita yang ada di kota Blitar. Jadi siswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi nggak usah keluar daerah, karena kita juga punya perguruan tinggi yang tidak kalah jauh dengan perguruan tinggi yang ada di kota lain. Ini yang sedang kita maksimalkan, peningkatan minat kuliah di Kota Blitar bagi warga. Dan semua administrasi dan biaya pendidikan, ditanggung oleh pemerintah kota”³²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan adanya pendanaan pendidikan dari sumber APBN dan APBD mempunyai peranan penting

³¹ BPS Kota Blitar tahun 2015 hlm 104

³² Wawancara Mokhamad Sidik. Kepala Dinas. Tanggal 6 Juli 2017. Pukul 10.00 WIBs

dalam penyelenggaraan pendidikan. Besaran dana pendidikan yang memadai menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pembagian tanggung jawab dan kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan dapat mengoptimalkan dan mengefisienkan alokasi dana pendidikan. Penggunaan dana pendidikan yang sesuai dan tepat memungkinkan peanglaksanaan dana yang efisien dan adil.

Pendanaan pendidikan di Indonesia dari sumber APBN dan APBD disamping tidak memadai juga pengalokasiannya belum efisien dan efektif. Demikian juga belum ada kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga terjadi tumpang tindih dalam pendanaan sebagian komponen dan kekurangan pendanaan sebagian komponen yang lain³³. Akibatnya pendidikan mengalami kekurangan dana yang merupakan salah satu akibat rendahnya mutu pendidikan. Studi ini berupaya mengidentifikasi lebih jauh tentang besarnya dana pendidikan dari APBN dan APBD serta pengelolaan, pengalokasian, dan penggunaannya sebagai upaya untuk mendukung memaksimalkan tingkat pendidikan di Kota Blitar.

Mengenai hal yang menjadi kendala dinas pendidikan dalam implementasi program ini dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

“Menurut saya faktor yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kota Blitar yaitu adanya anggaran yang terlambat cair sehingga aktivitas atau program yang ditetapkan tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan”.³⁴

³³ Yunita Angraini & Hendra Puranto. “Anggaran Berbasis Kinerja”. *Penyusunan APBD Secara Komperhensif. Edisi Pertama. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Februari 2010*

³⁴ Wawancara Mokhammad Sidik. Kepala Dinas Kota Blitar. Tanggal 6 juli 2017 pukul 10.00 Wib

Keterlambatan pencairan dana yang diberikan kepada sekolah masih kurangnya kepastian tanggal atau waktu penyaluran dana tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis yang memberikan setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan dalam proses pembelajaran tersebut yang seharusnya awal periode atau awal triwulan dananya harus sudah cair sesuai dengan aturannya, terlambatnya pencairan dana tersebut mungkin disebabkan oleh pemerintah dalam membuat rencana APBN³⁵.

Jadi sekolah harus berusaha meminjam untuk membiayai semua kegiatan yang sudah berlangsung terlebih dahulu Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan dalam pencairan dana mungkin disebabkan dengan adanya pembuatan RAPBN oleh pemerintah yang di buat pada awal tahun. Oleh sebab itu, maka pihak sekolah harus pandai- pandai berfikir bagaimana yang harus dilakukan agar semua kegiatannya bisa berjalan dengan lancar yaitu salah satunya harus mencari dana talangan terlebih dahulu, padahal pada kenyataannya kadang dana yang di pinjam itu lebih besardari pada dana yang keluar dari pemerintah³⁶.

³⁵ Pramono Anung, "Inovasi Walikota Kobi", *Membedah Kinerja Dan Inovasi Walikota Blitar Dalam Menerapkan APBD PRO RAKYAT*. Blitar Desember 2016. Hlm 41

³⁶ Pemerintah Kota Blitar, "Himpunan Pidato Walikota Blitar" tahun 2010 - 2015

Selain itu Bapak Mokhamad Sidik S.Sos., M.AP, beliau juga mengatakan mengenai hambatan dalam pelaksanaan program yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya hal lain yang menghambat program ini yaitu adanya kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, kondisi ini menjadikan aktivitas pengendalian program yang dilakukan tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan”³⁷.

Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sering sekali terdapat kekeliruan hal ini ditambah lagi dengan semakin singkatnya waktu penyusunan pertanggungjawabannya penyusunan sehingga membutuhkan pemikiran konsentrasi yang teliti apalagi ditambah dengan jangka waktu yang sangat singkat sehingga sangat mempersulit pihak sekolah dalam penyusunan laporan padahal laporan pertanggungjawaban tersebut harus didukung dengan data-data yang lengkap dan jelas sehingga masih banyak sekolah yang dalam penyusunan laporan banyak yang terlambat Berdasarkan uraian tersebut, maka kesulitan dalam laporan pertanggungjawaban merupakan kendala yang utama di dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis³⁸. Kesulitan ini dapat dipengaruhi karena singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban BOSDA, kurangnya kejelasan tentang pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan penggunaan dana yang sangat dibatasi dengan aturan- aturan yang dalam pembuatan laporan

³⁷ Wawancara Mokhamad Sidik. Kepala Dinas Kota Blitar. Tanggal 6 juli 2017 pukul 10.00 Wib

³⁸ Wawancara Mohkamad Sidik. *ibid*

pertanggungjawabannya harus sesuai dengan batasan yang sudah diatur di dalam buku pedoman.

Dikalangan masyarakat masih ada siswa yang belum mendapatkan bantuan maka langkah yang dilakukan dinas pendidikan mengatasi permasalahan tersebut dapat ditunjukkan dari hasil wawancara kepada Mokhamad Sidik S.Sos., M.AP yaitu sebagai berikut:

“Kalau siswa yang notabene warga kota blitar, dalam artian yang mana orang tuanya tercatat sebagai warga kota blitar di KTP, pasti mendapatkan subsidi pendidikan. Gak mungkin gak dapat. Soalnya kita kan menginstruksikan kepada pihak sekolah diseluruh kota Blitar, ketika pendaftaran siswa baru, agar dilakukan pendataan orang tua calon siswa, jadi dilihat kartu keluarga (KK) dan KTP nya. soalnya kan ini program pak wali. Jadi kalau semisal ada siswa yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, barangkali itu adalah siswa warga kabupaten yang bersekolah dikota”³⁹.

Jika ada masyarakat atau siswa yang tidak mendapatkan bantuan dan ingin mendapatkan akses tersebut, apa yang harus dilakukan orang tua/siswa dan bagaimana prosesnya.

“Kalau memang siswa itu tercatat sebagai warga kota Blitar, kecil kemungkinan untuk tidak mendapatkan bantuan. Karena proses pendataannya jelas. Tetapi kalau memang semisal ada siswa yang tidak mendapatkan, itu bisa melapor ke pihak sekolah, yang mana nanti akan diteruskan ke dinas pendidikan. Jika tidak digubris sekilah, itu bisa langsung lapor ke kita (Dinas Pendidikan)”⁴⁰.

Jika semua siswa mendapatkan bantuan tersebut bagaimana kemudian kita (masyarakat), bisa menilai penyaluran bantuan tersebut efektif atau tidak, dan ditanggapi sebagai berikut:

“Programnya ini kan niatnya baik ya. Yaitu dengan tujuan peningkatan pendidikan anak-anak kita. Nggak ada lagi alasan untuk tidak bersekolah karena ketidak adaan biaya, tidak ada lagi anak-anak yang tidak mau sekolah karena seragam atau sepatunya rusak, semua sudah difasilitasi

³⁹ Wawancara Mokhamad Sidik. Kepala Dinas Kota Blitar. Tanggal 6 juli 2017 pukul 10.00 Wib

⁴⁰ Wawancara Mohkamad Sidik. *ibid*

sama pemerintah kota. Untuk berangkat sekolah juga kami sediakan bis gratis, semua sudah dipermudah untuk kelancaran sekolah anak anak kita, warga kota Blitar. Jadi ya nggak ada pertimbangan yang kaya nggak harus dapt, semua merata, karena dana sudah dianggarkan oleh pemerintah kota kita”⁴¹.

Menurut Ibu Maratus Sholikhah wali murid warga Kecamatan Sananwetan Kota Blitar mengenai pendapat ibu terkait program APBD pro rakyat dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

“Menurut saya cukup membantu mas ya, soalnya cukup membantu meringankan para orangtua. Jadi gak perlu keluar biaya lagi untuk beli keperluan sekolah, Spp juga gak bayar. Kalo menurut saya kebijakan tersebut sangat membantu saya dalam aktivitas pendidikan bagi anak saya dan untuk aktivitas operasional biaya sekolah lainnya”⁴².

Adapun menurut Ibu Maratus Sholikhah Bantuan yang diterima yaitu sebagai berikut:

“Ya dapat mas, dikasi tas, sepatu, seragam, uang jait, alat-alat tulis. Pergi sama pulang sekolah juga dijemput soalnya kana ada bis gratis dari pak wali itu. Jadi kebijakan pak wali ini sangat tepat bagi pendidikan anak di Kota Blitar”⁴³.

Pendidikan gratis dapat dimaknai sebagai upaya membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik di sekolah sebagai perwujudan dari upaya membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang merupakan hak dari setiap warga negara sebagaimana amanat UUD 1945. Pendidikan gratis yang dikeluarkan oleh pemerintah itu diaplikasikan dalam program sekolah gratis. Secara umum, program tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka

⁴¹ Wawancara Mokhammad Sidik. Kepala Dinas Kota Blitar. Tanggal 6 Juli 2017 pukul 10.00 Wib

⁴² Wawancara Maratus Sholikhah. Wali Murid SMKN 1 Kota Blitar. Tanggal 14 Juli 2017 pukul 15.00 wib

⁴³ Wawancara Maratus Sholikhah. *ibid*

wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik.

Melalui kebijakan ini bisa dilihat sejauh mana pemerintah melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak setiap warganegara untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu, hanya memberitakan ribuan lulusan SD tidak mendapat kursi di SMP Negeri tidak cukup.

Kebijakan tersebut sangat sempurna, tetapi ketika berada di lapangan pasti akan mengalami penyesuaian situasi dan kondisi sekolah.

Ibu ketahuai tentang program tersebut yaitu sebagai berikut:

“Setau saya sih itu kan dengar-dengar nya pas waktu mau pemilihan dulu mas ya, dulu kan janji nya pakwali mau ada program Pro rakyat, katanya sekolah mau digratiskan terus juga anak2 dapet bantuan alat2 sekolah. terus waktu anak saya nerima ya kaget ternyata bener dikasih”⁴⁴.

Darimana ibu mengetahui terkat program tersebut? Apakah ada sosialisasi dari dinas terkait, maka diberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sewaktu anak ibu menerima bantuan tersebut, apakah dijelaskan akan mendapatkan bantuan sampai kapan. Waktu itu sih disekolah dikasi tau guru-guru kalau bantuan itu dari sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi tapi kalau yang untuk kuliah digratiskan dengan catatan harus kuliah di kota blitar soalnya ada kampus baru”⁴⁵.

Sekolah merupakan media sosialisasi yang lebih luas dari keluarga.

Sekolah mempunyai potensi yang pengaruhnya cukup besar dalam pembentukan sikap dan perilaku seorang anak, serta mempersiapkannya untuk penguasaan peranan-peranan baru di kemudian hari di kala anak atau orang tidak lagi menggantungkan hidupnya pada orang tua atau

⁴⁴ Wawancara Maratus Sholikah. Wali Murid SMKN 1 Kota Blitar. Tanggal 14 Juli 2017 pukul 15.00 wib

⁴⁵ Wawancara Maratus Sholikah. *ibid*

keluarganya, dengan kondisi ini dinas menggunakan media sekolah sebagai sosialisasi dalam program sekolah gratis. Sekolah adalah tempat persinggahan antara keluarga dengan masyarakat. Dalam sekolah diajarkan lebih luas tentang baik buruk, tentang nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat yang sebelumnya telah dikenalkan dalam pendidikan informal di dalam keluarga. Dalam sekolah individu dilatih untuk mempraktekan hal-hal yang telah ia pelajari dalam keluarga dan sekolah itu sendiri. Dengan kata lain nilai-nilai dan norma social yang berlaku di masyarakat dan telah dipelajari di keluarga dan sekolah telah diterapkan sebagai latihan sebelum secara penuh terjun dan berperan dalam masyarakat.

Menurut Maratus Sholikhah program ini efektif untuk menunjang pendidikan para siswa dan bisa mengatasi masalah pendidikan yang ada di kota blitar, dengan tanggapan sebagai berikut:

“Kalau menurut saya sih mas, secara ekonomi ya membantu para orang tua kita gak perlu mikirin biaya sekolah anak2 lagi semua udah di bantu pemerintah. Ya bagusnya gak ada lagi alasan untuk gak sekolah karena masalah biaya, sekolah juga udah di antar jemput⁴⁶”

Sejauh ini Ibu Maratus Sholikhah mengetahui ada anak dari kerabat / teman yang tidak mendapatkan program bantuan ini

“Kalau dari orang-orang dekat saya sih setau saya dapet semua mas ya soalnya kan merata untuk tiap sekolah di kota blitar. Tapi ya kurang tau juga pastinya kalau soal yang gak dapet itu⁴⁷”

⁴⁶ Wawancara Maratus Sholikhah. Wali Murid SMKN 1 Kota Blitar. Tanggal 14 Juli 2017 pukul 15.00 wib

⁴⁷ Wawancara Maratus Sholikhah. *ibid*

Kebijakan BOS dilaksanakan sebagai implementasi UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Itu artinya anak-anak usia SD di semua wilayah Indonesia harus sekolah hingga jenjang SMP tanpa dibebani dengan beragam pungutan dari pihak sekolah⁴⁸. Masalahnya adalah benarkah sekolah gratis itu tidak menarik biaya dari siswanya sebagaimana yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Namun demikian adanya masih mendengar adanya keluhan dari orang tua murid terkait adanya beragam pungutan liar di lingkungan sekolah. Sisi gratis yang didengungkan Depdiknas perlu diperjelas konsepnya agar tidak terjadinya kesimpangsiuran makna sekolah gratis. Jika tak ada konfirmasi yang jelas tentang apa yang digratiskan itu maka dikhawatirkan masyarakat terutama di desa-desa yang awalnya tertarik menyekolahkan anaknya justru berbalik menuding adanya kebohongan dan tidak menyekolahkan anak-anaknya. Bagi mereka pemahaman sekolah gratis adalah semua biaya anak-anak sekolah ditanggung pemerintah. Untuk menyikapi kebingungan publik, pemerintah perlu segera mensosialisasikan tentang ide sekolah gratis ini secara terbuka⁴⁹.

⁴⁸ Nanang Faah. "Analisa Kebijakan Pendidikan" Rumusan Analisis Kebijakan Pendidikan Yang Baik, Mencakup Proses, Metode Dan Teknik Serta Prosedur Untuk Memecahkan Masalah Pendidikan. Remaja Rosdakarya. Yogyakarta 2014 Hlm 57

⁴⁹ Nanang faah. *Ibid* hlm 106

Termasuk pula menjelaskan tentang kriteria pengelolaan dana BOS sebagai salah satu penopang dana wajib belajar di sekolah. Pemerintah perlu pula mensosialisasikan PP No. 48/2008 tentang pembiayaan pendidikan yang mencakup biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik.

Biaya satuan pendidikan sendiri terdiri dari biaya investasi, biaya operasional untuk personalia maupun nonpersonalia, bantuan dana pendidikan dan beasiswa. Sementara biaya pribadi peserta didik adalah dana yang harus dikeluarkan peserta didik untuk bias mengikuti proses pendidikan. Disini jelas terlihat bahwa tidak semua dana pendidikan ditanggung pemerintah seperti biaya peserta didik yang menjadi tanggung jawab masyarakat khususnya orangtua siswa.

Menurut Fawas Amanulloh, 18 th pelajar SMKN 1 kota blitar apa yang diketahui tentang program APBD pro rakyat khususnya untuk bidang pendidikan

“Yang tau saya sih mas, ini program bantuan gitu. jadi murid dikasih bantuan kaya alat-alat sekolah”⁵⁰.

Apakah program ini cukup efektif membantu meningkatkan proses belajar kamu selama ini

“Kalau dalam meningkatkan proses belajar, yang membantu bis gratis antar jemput itu mas jadi yang gk punya kendaraan kan gk ada alasan buat terlambat sekolah atau bolos. Kalau yang lainnya gak ada hubungannya si mas sama peningkatan proses belajar cuman orang tua terbantu aja kalau dari segi ekonomi dengan adanya bantuan ini”⁵¹.

⁵⁰ Wawancara Fawas Amanulloh. Siswa SMKN 1 Kota Blitar. Tanggal 14 juli 2017 pukul 15.00 Wib

⁵¹ Wawancara Fawas Amanulloh. *Ibid*

Apakah kamu diberitau sewaktu menerima bantuan, kamu diberitau sampai kapan program bantuan pemerintah ini didapatkan oleh para siswa sehingga mendukung program sekolah tersebut.

“Setau saya sih mas, sampai kuliah. Pemberitauanya dari Kepala Sekolah dan guru tapi kalau kuliah yang grati, cuman yang kuliah dikampus blitar diputra sang fajar”⁵².

Gambar 4.2

Siswa SMKN 1 Kota Blitar



Sumber : dokumentasi dengan siswa SMKN 1 Kota Blitar

⁵² Wawancara Fawas Amanulloh. Siswa SMKN 1 Kota Blitar. Tanggal 14 juli 2017 pukul 15.00 Wib

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal nasional dan global Pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa serta menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik⁵³. Melalui proses pendidikan akan menjadikan seseorang semakin memiliki makna, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat yang akan mengantarkannya menjadi sumber daya manusia yang kompetitif. Mengingat manfaat pendidikan yang sangat luas dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di segala bidang, maka pendidikan telah menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat sejak Indonesia merdeka.

Menurut mas Henry apa yang mendasari/menjadi pertimbangan dikeluarkanya program APBD pro rakyat, khususnya dalam bidang pendidikan⁵⁴ :

“Jadi APBD pro rakyat itukan merupakan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih,dimana visi nya adalah APBD pro rakyat dan misi yang kedua adalah Blitar cerdas. Karena pendidikan merupakan dasar pembangunan suatu daerah karena kita pandang sangat perlu. Nah lucunya di Indonesia ini kan pendididkan masi bayar,padahal pendidikan merupakan makanan pokoknya oleh karena itu kita harus

⁵³ Nanang Faah. “Analisa Kebijakan Pendidikan” Rumusan Analisis Kebikan Pendidikan Yang Baik, Mencakup Proses, Metode Dan Teknik Serta Prosedur Untuk Memecahkan Masalah Pendidikan. Remaja Rosdakarya. Yogyakarta 2014 Hlm 89

⁵⁴ Wawancara Henry Pradigta Anwar. Ketua Komisi 1 Bidang Pendidikan. Tanggal 4 Juli 2017 pukul 18.30 Wib.

menciptakan sumber daya manusia yang berakademis, oleh karena itu munculnya pendidikan yang gratis yang merupakan salah satu misi dari APBD pro rakyat”

Apakah kebijakan tersebut sudah berjalan sesuai rencana dan sejauh ini bagaimana implementasi kebijakan tersebut sejauh ini⁵⁵ :

“ APBD pro rakyat itu sudah dua jilid,yang pertama 2010-2015 dan jilid kedua 2016-2021, APBD jilid pertama program pendidikannya adalah rintisan sekolah gratis jadi maksudnya dulu SPP bayar dan sekolah masi bayar untuk mulai 2010 biaya kita gratiskan, kemudian digratiskan lagi fasilitas dan perlengkapan itu sudah berjalan lancar itu namanya program rintisan sekolah gratis. Nah APBD pro rakyat jilid kedua sekolah gratis itu sudah tidak ada, sudah jadi Blitar cerdas semua sudah diurutkan di RPJMD dan implementasinya semua berjalan sesuai rencana dan sudah dilaksanakan”

Apa upaya- upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar dalam memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana :

“ jadi ada yang namanya RPJMD kan tiap 5 tahun sekali disusun, dan tiap tahunnya disusun dianggran APBD disitu dijelaskan Kota Blitar ini pendidikannya tiap tahunnya mau dibawa kemana sampai nanti tahun 2021. Nah sampai tahun 2021 pemerintah warga kota mendapatkan sekolah gratis dan menjadi masyarakat yang cerdas dan tahapan-tahapannya ada disitu”

Kebijakan tersebut kan sudah berjalan sejak 2010, berarti sudah pernah dievaluasi, kemudian apa dampak nyata/hasil nyata program kebijakan tersebut berdasarkan hasil evaluasi⁵⁶ :

“Untuk hasilnya sampean bisa tanya kemasyarakat yang merasakan langsung dan saya pernah survei di pegadaian, pada saat awal musim tahun ajaran baru dulu sebelum tahun 2010 banyak masyarakat yang ramai mengadaikan barang seperti emas, tv, sepeda motor untuk membiayai anak-anaknya untuk bersekolah. Nah sekarang allhamdulillah sudah menurun drastis dan angka putus sekolah sudah sangat menurun semanjak adanya program APBD pro rakyat itu merupakan salah satu dampak/hasilnyata dalam keberhasilan program ini”

⁵⁵ Wawancara Henry Pradigta Anwar. *ibid*

⁵⁶ Wawancara Henry Pradigta Anwar. Ketua Komisi 1 Bidang Pendidikan. Tanggal 4 Juli 2017 pukul 18.30 Wib.

Selama ini bagaimana bentuk control Pemerintah (DPRD) terhadap jalanya kebijakan tersebut? control terhadap Dinas Pendidikan yang membawahi jalanya program bantuan pendidikan ini⁵⁷ :

“Control itu setiap tahun, jadi tiap tahun mereka mengajukan anggaran ke kita (DPRD) untuk tiap tahun itu pendidikan butuhnya apa seperti kebutuhan perlengkapan pendidikan gratis sesuai nggak dengan jumlah siswa jadi DPRD selalu mengontrol tiap agenda-agenda yang berkaitan dengan Kota Blitar khususnya pendidikan”.

Menurut mas Henry apa saja yang perlu dibenahi kedepanya terkait program bantuan pendidikan ini dan sekiranya apa yang masih dinilai kurang atau belum maksimal :

“Sebenarnya saya pengen siapa saja yang ingin bersekolah dikota blitar itu bisa gratis, selama ini kan kita hanya menggratiskan penduduk asli kota blitar karena anggran kita belum kuat kalau anggaran kita kuat karena pendididkan merupakan ujung tombak sumber daya manusia. Kalau mengenai program-program yang sudah ada saya kira sudah berjalan dengan baik”.

⁵⁷ Wawancara Henry Pradigta Anwar. *ibid*

Gambar 4.2
Ketua Komisi 1 Bidang Pendidikan Henry Pradigta Anwar



Sumber : Dokumentasi Dengan Ketua Komisi 1 Bidang Pendidikan

Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk meningkatkan taraf layanan pendidikan agar semakin berkualitas dan berkompeten dari waktu ke waktu dan pendidikan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Kota Blitar. Seperti halnya yang menjadi andalan Pemerintah Kota Blitar Samanhudi Anwar, dengan membuat terobosan atau inovasi-inovasi untuk masyarakat seperti inovasi seragam gratis dan ongkos jahitnya, inovasi ikat pinggang gratis, inovasi sepatu gratis beserta kaos kakinya, inovasi angkutan sekolah gratis, inovasi tas gratis, inovasi alat-alat tulis dan buku gratis, inovasi konsep sepeda gratis, inovasi pendaftaran uang SPP dan daftar ulang

gratis, inovasi bantuan uang kuliah bagi siswa yang berprestasi, dan juga inovasi tablet dan pengembangan e-learning untuk memudahkan menerima dan mengirimkan informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa-siswi Kota Blitar⁵⁸

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut telah dan terus dilakukan, mulai dari berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas standar guru atau pendidik dan pemerataan guru sehingga tidak adanya sekolah yang menjadi unggulan di Kota Blitar karena kualitas tenaga pendidik dalam hal ini guru sudah dibagi rata tiap sekolah, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan bahkan kemudahan untuk akses menuju sekolah sudah dipermudah, sampai dengan peningkatan mutu manajemen sekolah karena dalam hal ini sekolah dituntut untuk menjadikan siswa dan siswi yang bisa bersaing dan berkualitas guna meningkatkan sumber daya manusia. Namun, indikator ke arah mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan masih banyak siswa yang putus sekolah karena faktor kemiskinan. Salah satu aspek penting dalam pembangunan pendidikan adalah pembiayaan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan operasional di satu sisi, dan di sisi lain bagaimana melindungi masyarakat (khususnya bagi keluarga yang kurang mampu) dari hambatan biaya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tidak hanya asal pendidikan.

^{58 58} Pramono Anung, "Inovasi Walikota Kobo", *Membedah Kinerja Dan Inovasi Walikota Blitar Dalam Menerapkan APBD PRO RAKYAT*. Blitar Desember 2016. Hlm 116

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan- kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam poros es belajar mengajar. Hal-hal yang berkaitan dengan ini meliputi: perencanaan anggaran sekolah, pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan. Biaya pendidikan, termasuk dari mana sumber-sumbernya diperoleh, sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Biaya sebagai komponen yang sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan dampaknya tidak dapat disangkal. Salah satu masalah pokok dalam hal pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan operasional sekolah di satu sisi, dan di sisi lain bagaimana melindungi masyarakat (khususnya dari keluarga tidak mampu) dan hambatan biaya untuk memperoleh pendidikan

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum efektivitas implementasi dari kebijakan Pendidikan Gratis di Kota Blitar bisa dikatakan berhasil. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator dari tujuan yang tertera pada tujuan program pendidikan gratis tersebut. Untuk melihat efektivitas implementasi dari Pendidikan Gratis di Kota Blitar secara lebih menyeluruh dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian tujuan berikut ini:

1. Kebijakan Pendidikan Gratis di Kota Blitar sangat membantu meringankan biaya pendidikan menengah kebijakan pendidikan gratis ini memberikan dukungan bagi masyarakat terutama masyarakat Kota Blitar yang berpenghasilan berkecukupan atau menengah kebawah. Masyarakat merasakan langsung adanya kemurahan dalam biaya pendidikan. Sasaran dari tujuan ini memang berdampak positif, tetapi pelaksana kebijakan yang harus berusaha keras untuk mencari dana tambahan untuk membiayai operasional sekolah.

2. Pemerataan memperoleh kesempatan belajar kebijakan pendidikan gratis ini tidak murni membebaskan biaya sekolah. Kebutuhan akan seragam tidak ter-cover dalam pembebasan biaya operasional sekolah. Masyarakat tetap harus mengeluarkan dana untuk seragam. Pemerintah memberikan dana tambahan yang dinamakan Bantuan Siswa Miskin. Tidak berhenti di situ, pihak sekolah juga ikut ambil bagian sehingga program tersebut benar-benar memberikan dukungan dalam proses untuk mendukung sekolah gratis sesuai dengan ketentuan.
3. Meningkatkan manajemen pendidikan dalam rangka mewujudkan standar biaya pendidikan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan adanya kebijakan pendidikan gratis ini, memotivasi dari pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan diawali peningkatan kualitas tenaga pengajar, diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi siswa untuk dapat menjadi lebih kritis dan kreatif. Agar kebijakan ini tidak menjadi sia-sia. Pemerintah pun juga memberikan program daerah binaan untuk masing-masing kecamatan. Supaya masing-masing daerah dapat bertukar ide sehingga aktivitas yang dilakukan benar-benar mencerminkan kondisi pendidikan yang terdapat di Kota Blitar yang menetapkan kebijakan sesuai dengan harapan masyarakat.
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan keberhasilan kebijakan pendidikan gratis ini dapat terjadi jika adanya interaksi dan hubungan timbal balik antara pelaksana yakni pihak sekolah dan kelompok sasaran dalam hal ini

masyarakat. Masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sekolah memfasilitasi masyarakat. Masyarakat mau untuk mendukung program- program dari sekolah. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, kendala- kendala untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa dapat diminimalis.

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang diberikan Peneliti untuk keberlanjutan dari kebijakan ini, antara lain:

1. Bagi pemerintah, harus memberikan dana tambahan untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Sehingga para pelaksana tidak kesulitan dalam menjalankan kebijakan ini akibat dari kekurangan dana dan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Upaya sosialisasi harus dilakukan sehingga ketidaktahuan masyarakat akan apa saja yang digratiskan masih banyak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
3. Bagi masyarakat, untuk terus terlibat dan berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Anak diberi motivasi untuk terus belajar dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan jangan sampai membiarkan adanya anak untuk putus sekolah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian ini. Penelitian ini masih sangat sedikit dan

diharapkan, dengan adanya penelitian- penelitian yang sana, dapat meningkatkan kinerja dari kebijakan pendidikan gratis ini. Sehingga, dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan kebijakan pendidikan gratis.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Anu rofiq, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmiah Pawiyatan, Vol.20, No.1, Maret 2003

Gumilar Rusliwa, *Memahami Metode Kualitatif*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol.9, No.2, Desember 2005

Buku

Anggraini, Yunita & Puranta Hendra.2010. *Anggaran Berbasis Kinerja. Penyusunan APBD Secara Komperhensif*. Februari. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Anung, Pramono.2016. *Inovasi Wali Kota Kobo, Membedah Kinerja dan Inovasi Wali Kota Blitar dalam Menerapkan APBD PRO RAKYAT*. Desember. Pemerintah Kota Blitar.

Anwar, Samanhudi.2015. *Pendidikan Gratis: Antara Teori dan Praktek. Pintar Tak Harus Bayar*. Juli. Pemerintah Kota Blitar.

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta. Gramedia Pustaka.

J. Moleong, Lexy. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Raja Grafindo Persada.

Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah :Pola Kegiatan,Kekuasaan dan Prilaku kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta. Sinar Grafika.

Rowe, Alan J. 2005. *Creative Intelligence: Membangkitkan Potensi Inovasi dalam Diri dan Organisasi anda*. Bandung. Kaifa PT Mizan Pustaka

Dokumen

BPS Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2014,2016.

Kumpulan Sambutan Wali Kota Blitar Tahun 2011-2016.

Pemerintah Kota Blitar.2015. *Himpunan Pidato Wali Kota Blitar 2010-2015*.

RPJMD Kota Blitar tahun 2010-2015 dan 2016-2021